



LAPORAN 2 TRIWULAN 2022



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	4
I. Rencana Kerja ICCTF Tahun 2022	6
II. Progres dan Capaian	11
1. Progres Proyek	12
A. Coremap–CTI World Bank	12
B. Coremap–CTI Asian Development Bank	19
C. Blended Finance	59
D. Blue Carbon	65
2. Program Strategis dan Penggalangan Dana (<i>Fundraising</i>)	69
2.1 Rapat NFT dengan ADB	67
2.2 Pembahasan Penyusunan Usulan Daftar Rencana Kegiatan Hibah Towards Sustainable and Conversion – Free Aquaculture in Indonesia Seas Large Marine Ecosystem (ISLME)	67
3. Komunikasi, Outreach dan Kemitraan	69
3.1 Media Sosial	69
3.2 Produksi Media	74
3.3 Media Monitoring	76
III. Audit, Keuangan dan Operasional	81
1. Laporan Audit Tahun 2022	81
2. Informasi Keuangan Periode Januari - Maret 2022	81
3. Operasional / Kesekretariatan	82



RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan Lembaga Wali Amanat Nasional (*National Trust Fund*) dalam bidang penanganan perubahan iklim. Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, ICCTF mengelola dana APBN dan dana hibah dari mitra pembangunan dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca serta implementasi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kegiatan yang dilaksanakan ICCTF meliputi pengelolaan proyek, penggalangan dana, komunikasi dan *outreach* serta operasional Satker. Dalam hal pengelolaan proyek, ICCTF membagi proyek-proyek yang dikelola berdasarkan *thematic windows* ke dalam empat fokus area, yaitu i) *Land-based Mitigation*; ii) *Adaptation and Resilience*; iii) *Energy*, dan; iv) *Marine-based*. Sejalan dengan peningkatan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan laut dan sumber dayanya, saat ini ICCTF menitikberatkan fokus pada tema program berbasis kelautan (*Marine-based*) sejak tahun 2020.

Implementasi proyek hibah COREMAP – CTI World bank (WB) yang dilaksanakan pada 4 lokasi yaitu TNP Laut Sawu, SAP Waigeo Sebelah Barat, KKPD Raja Ampat, dan SAP Raja Ampat di 2 provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat telah mencapai tahap akhir. Progress pembangunan infrastruktur sudah selesai dan telah diserahkan kepada *stakeholder* setempat. Pada periode ini juga telah dilaksanakan kegiatan Workshop Penutupan dan Diseminasi Proyek COREMAP-CTI WB di Jakarta.

ICCTF juga sudah mengimplementasikan seluruh kegiatan COREMAP – CTI Asian Development Bank (ADB) yang dilaksanakan oleh Konsultan Perusahaan dan LSM. Kegiatan yang sudah dilaksanakan berada di 3 lokasi di KKPD Nusa Penida, Provinsi Bali; TPK Gili Balu, dan TWP Gili Matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada periode ini kegiatan yang dicapai adalah survei dan identifikasi ekosistem di lokasi *project*, identifikasi potensi sumber daya perikanan di lokasi *project*, serta pelatihan untuk Pokmaswas dan Poklahsar. Selain itu telah dilaksanakan kegiatan Mid-Term Review (MTR)

Bersama dengan Tim dari ADB, serta monitoring dan penyulaman ulang mangrove yang terkena gelombang. Progress pembangunan infrastruktur masih dalam proses penyusunan DED. Empat mahasiswa *master degree* telah berada di Brisbane, Australia.

Pada periode ini kegiatan *Blended Finance* melanjutkan konsolidasi dengan World Bank dan Asian Development Bank. Pada periode ini juga telah dilaksanakan Blue Finance Stakeholder Workshop yang diadakan di Jakarta.

Kegiatan *Blue Carbon* pada periode ini berupa diskusi dengan AFD. Selain itu telah dilaksanakan diskusi dengan DISER terkait rencana pelatihan Pengelolaan Ekosistem Blue Carbon.

Penggalangan dana lainnya juga mulai dilakukan yaitu terkait *Marine Tourism* dan *Sustainable Aquaculture*. Selain itu pembahasan tentang potensi dukungan pendanaan lain masih terus dilanjutkan.

Hasil kegiatan diwartakan dalam website ICCTF dan melalui media sosial ICCTF. Selain itu kerjasama penyebaran informasi kegiatan lapangan juga menggunakan media sosial yang dilakukan bersama-sama dengan Mitra Pelaksana. Perbaikan website ICCTF mulai dilakukan pada masa ini. Selanjutnya tim komunikasi ICCTF melakukan analisis media sosial setiap akhir bulan guna melihat perkembangan sosialisasi program kepada masyarakat umum.



1

RENCANA KERJA ICCTF TAHUN 2022

Q1

JAN – MAR

Pengelolaan Proyek

- Monev dan *spotcheck* Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Pengadaan konsultan COREMAP–CTI ADB
- Pelaksanaan beasiswa *master degree* COREMAP–CTI ADB
- Pemeriksaan Asset COREMAP-CTI WB

Penggalangan Dana

- Persiapan proyek Blue Finance ADB

Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik
- Distribusi kalender ICCTF 2022

Dukungan Operasional

- Exit Strategy
- Pengadaan staf ICCTF
- Workshop Koordinasi Kuartal I ICCTF 2022

Q2

APR – JUN

Pengelolaan Proyek

- Monitoring lapangan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB
- Pengadaan konsultan COREMAP–CTI ADB
- Studi bioekonomi Tuna, Kakap Merah dan rumput laut di Lesser Sunda

Penggalangan Dana

- Persiapan proyek Blue Finance

Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik

Dukungan Operasional ICCTF

- Audit BPK
- Pengadaan staf ICCTF
- Workshop Koordinasi Kuartal II ICCTF 2022

Q3
JUL - SEP

Pengelolaan Proyek

- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda
- Workshop Evaluasi Proyek Hibah

Penggalangan Dana

- Persiapan proyek Blue Finance

Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik

Dukungan Operasional ICCTF

- Workshop Koordinasi Kuartal III ICCTF 2022

Q4

OCT - DEC

Pengelolaan Proyek

- *Programmatic and Finance Monitoring*
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi dan pelaporan studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda
- Workshop Evaluasi Proyek Hibah

Penggalangan Dana

- Implementasi Proyek Blue Finance

Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan media elektronik
- Produksi Kalender ICCTF 2023

Dukungan Operasional ICCTF

- Workshop Koordinasi Kuartal IV ICCTF 2022



2

PROGRES dan
CAPAIAN

1 | PROGRESS PROYEK

A. COREMAP-CTI World Bank

Kegiatan PIU COREMAP - CTI World Bank

A

Undangan
Implementation
Support Mission
World Bank

Pertemuan ini diselenggarakan secara online pada tanggal 18-21 April 2022. ICCTF menghadiri undangan kegiatan ini pada tanggal 18 April dengan agenda pembahasan *overall progress implementation*, 20 April dengan agenda pembahasan *FM and Procurement* dan *Safeguards* pada Komponen 3, dan pada tanggal 21 April dengan agenda pembahasan *Means of Verification (MOV)*, *ICR* dan *Legacy Review*. Beberapa penyampaian poin penting oleh ICCTF pada pertemuan tersebut antara lain sebagai berikut:

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main content is a presentation slide with the following table:

INDICATORS	PROGRESS UNTIL APRIL 2022
Intermediate Result 3.3 Provincial ICZM action plan activities implemented in target MPA areas	17 activities listed in RZWP3K action plan West Papua implemented:
Target 2022: 14 Activities listed in RZWP3K action plan implemented	<ol style="list-style-type: none">1. Enhance capacity of MHA to support the sustainable management of marine and coastal resources2. Facilitate the acknowledgement of existing MHA and related to coastal and marine in West Papua3. Development of regulation on natural resources utilization at MHA sites4. Improve tourism attraction and destination5. Improve the ecotourism infrastructure and facility6. Development code of conduct for charismatic species interaction/tourism7. Implemented cold chain technology post harvesting to improve the quality of fisheries product8. Improve aquaculture infrastructure and facility9. Research and development10. Mangrove ecosystem rehabilitation11. Enhance capacity of MPA management body staff12. Development of regulation and SOP for MPA management in MPA sites13. Development of MPA Management infrastructures and facility14. Monitoring and evaluation15. Habitat and fish population rehabilitation16. Surveillance and controlling marine protected area17. Socialization, awareness and education on marine protected area

Gambar 1.A.1. Penyampaian progres oleh ICCTF

- PDO Level: 4 target pengelolaan MPA sudah mencapai pengelolaan level optimum.
- Hasil EVIKA oleh KKP 2020/2021 sekitar 54-83%.
- Hasil *self-assessment* untuk tahun 2022 sekitar 66-89% dengan salah satu MPA mencapai pengelolaan yang berkelanjutan. FGD *self-assessment* ini dilakukan bersama dengan KKP, Mitra dan ICCTF.

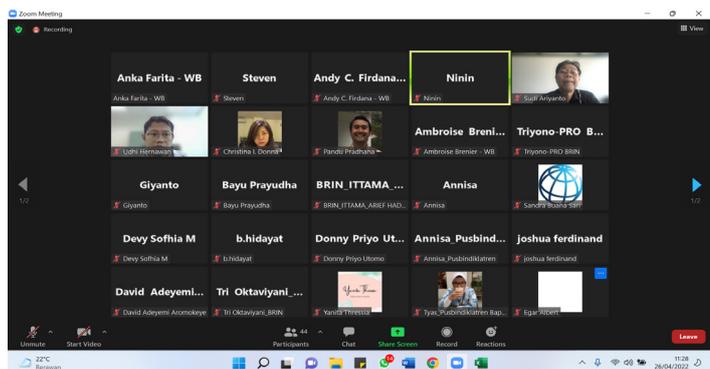
- Intermediat target 3.1 terkait infrastruktur ekowisata melebihi target, dimana target proyek sekitar 8 infrastruktur ekowisata terbangun yang pada implementasinya terdapat 9 telah dibangun.
- Progress untuk komponen POKMASWAS sudah ada 23 POKMASWAS yang sudah di SK-kan oleh provinsi, dan ada sekitar 22 POKMASWAS yang sudah melakukan patroli secara reguler. Beberapa training dan juga peralatan sudah diberikan kepada POKMASWAS. POKMASWAS melakukan pengawasan sekitar 3 kali dalam seminggu baik yang berada di Raja Ampat maupun yang di Rote Ndao.
- Telah dikembangkan website sistem monitoring implementasi RZWP3K di Papua Barat
- Kegiatan rehabilitasi lamun, mangrove dan karang dilakukan oleh masyarakat.
- Terkait implementasi RAN Cetacean, terdapat sekitar 21 kegiatan yang telah dilakukan.
- Jalur migrasi pari manta yang telah ditagging berkontribusi kepada pengelolaan MPA.
- *Action plan* UKL UPL untuk GP1, GP 2, GP3 dan GP4, sudah selesai.
- Laporan pengaduan masih dilakukan sampai akhir Maret 2022, dan tidak ada complain.
- Status penyerapan anggaran per 31 Maret 2022 sebesar USD 9.496.226,70 atau sekitar 94,96%. Laporan keuangan sudah disubmit ke BPK dan sudah selesai mendapatkan *review*. Alokasi DIPA untuk tahun 2022, sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 12.829.355.624,00 dan terserap 65%.

B Wrap Up dan Penyampaian Aide Memoire Mission COREMAP-CTI World Bank

Wrap up diselenggarakan secara online pada tanggal 26 April 2022. Agenda dari pertemuan ini adalah diskusi dan review dokumen Aide Memoire. Hasil dari pertemuan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Dokumen Aide Memoire tidak mengalami banyak perubahan, beberapa data dan naratif sudah dikonfirmasi ke BRIN dan ICCTF.

- Draft Aide Memoire dikirim oleh Anka pada tanggal 26 April 2022.
- Draft Aide Memoire masih direview sekali lagi dan beberapa hal dalam dokumen tersebut dilengkapi oleh BRIN dan ICCTF.
- ESAP update dikirimkan pada tanggal 10 Mei 2022.
- Pengumpulan laporan workshop self assessment EVIKA dilaporkan pada tanggal 17 Mei 2022.
- Procurement status di STEP system untuk BRIN di-upload sebelum tanggal 23 Mei 2022.
- Revisi draft Legacy Review dibagikan ke WB pada tanggal 30 Mei 2022.



Gambar 1.A.2. Diskusi pembahasan dokumen Aide Memorie

C

Workshop Penutupan dan Diseminasi Program COREMAP-CTI WB

Program COREMAP-CTI WB berakhir dengan kegiatan workshop penutupan dan diseminasi program yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2022 bertempat di Hotel Fairmont Jakarta. Melalui ICCTF dan para mitranya, program COREMAP-CTI ini telah diterapkan di dua Provinsi yang terpilih dan masuk dalam bagian penting Segitiga Terumbu Karang Dunia, yaitu di Raja Ampat, Papua Barat, dan Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan hibah dari Bank Dunia melalui GEF sebesar US\$ 6,2 juta.

Meski dengan periode yang cukup singkat (2019-2022), program ini telah memberikan dampak bagi rehabilitasi lingkungan setempat. Lebih penting dari itu, program ini juga telah memperkuat pemberdayaan masyarakat, bukan saja memberikan alternatif ekonomi, tetapi juga kesadaran arti penting wilayah tempat mereka tinggal. Dalam sambutannya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Bapak Arifin Rudiyanto, juga menyampaikan bahwa implementasi COREMAP-CTI WB ini telah menghasilkan Inovasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dan juga perlindungan sumber daya hayati dan konsep partisipatif pengelolaan Kawasan Konservasi dan perlindungan sumber daya hayati.

Selanjutnya Direktur Eksekutif ICCTF, Dr. Tony Wagey menjelaskan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir dan laut, di antaranya adalah mencairnya es di kutub, kenaikan muka air laut, dan *coral bleaching*.

Salah satu strategi pengelolaan untuk menangani dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir dan laut adalah melalui program COREMAP-CTI. Dr. Tony Wagey juga menyampaikan hasil dan capaian, serta *legacy* yang dari COREMAP-CTI World Bank.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan para penanggap, yaitu George Hadjoh selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Prof. Suharsono dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Dr. Ridwan Sala selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua. Ketiga penanggap memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih terhadap keberhasilan program COREMAP-CTI World Bank serta memberikan masukan-masukan untuk keberlanjutan dari program ini, yaitu kemandirian ekonomi, kemandirian masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengawasan Kawasan, serta kesadaran menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan secara terus menerus.



Gambar 1.A.3. Diskusi dengan Para Narasumber



Gambar 1.A.4. Penandatanganan BAST

Selanjutnya masyarakat lokal yang diundang memberikan testimoni terhadap program COREMAP-CTI WB dimana masyarakat sangat terbantu karena bertambahnya pengetahuan masyarakat terhadap potensi dari ekosistem daerah mereka untuk dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Setelah itu dilakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penerima Manfaat.

Dalam pidato penutupan, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, kemudian menyampaikan poin-poin berikut:

- Hal yang telah dilakukan merupakan bentuk kolaborasi dengan pihak terkait, dengan berbagai tantangan yang terjadi. Hasil kolaborasi dengan baik memberikan hasil yang ditunjukkan pada hari ini.
- Hal ini merupakan hasil implementasi berdasarkan science based policy. Sukses story berdasarkan implementasi ini menghasilkan cerita yang berbagai macam.
- Meskipun pekerjaan lapangan telah diselesaikan, namun adanya pekerjaan rumah yang tidak boleh dilupakan. Hal itu adalah komitmen yang diciptakan oleh setiap elemen di sini. Komitmen yang telah dibuat harus tetap berlanjut.

D Undangan BRIN: Pembahasan Safeguard COREMAP-CTI

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juni 2022 di Bandung. Agenda dari kegiatan ini adalah diskusi mengenai implementasi Safeguard pelaksanaan proyek COREMAP CTI WB oleh BRIN dan ICCTF. Berikut adalah beberapa poin hasil pembahasan dari kegiatan ini:

- Laporan ESMP akan dikirimkan ke WB
 - Laporan safeguard akan digabungkan dengan laporan BRIN sebagai kompilasi safeguard
- Perlu dikoordinasikan terlebih dahulu apakah laporan safeguard ditambahkan ke Laporan ICR
 - Masukan outcome dan output setiap implementasi kegiatan masuk ke dalam Summary
 - Template laporan kompilasi safeguard akan dibuat oleh BRIN dan dibagikan ke ICCTF



Gambar 1.A.5. Diskusi safeguard COREMAP-CTI

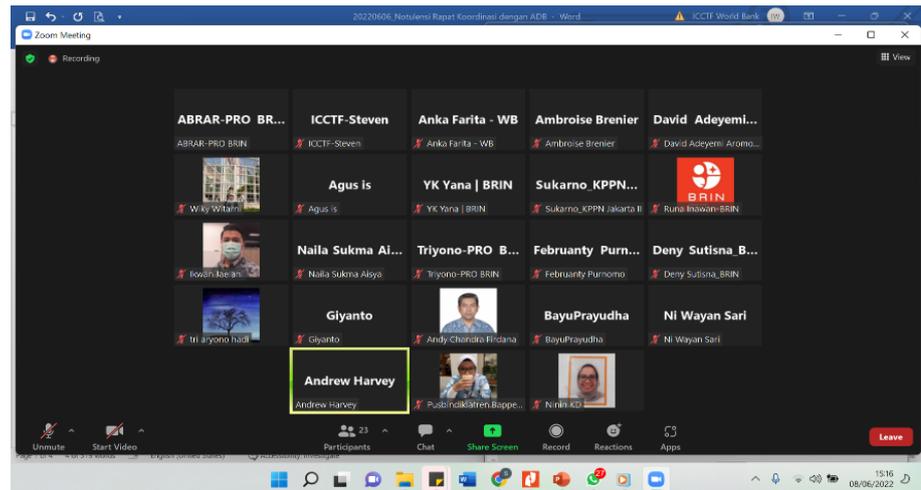
E

Undangan BRIN: Koordinasi Penutupan Proyek COREMAP-CTI

- Dari Pusbindiklatren status anggaran sudah dilakukan pembayaran final dan bisa dilakukan sebelum tanggal 20 Juni 2022
- Procurement BRIN masih ada dokumen yang perlu di upload sebelum tanggal 25 Juni.
- Terkait safeguard, dokumen pendukung Q1 diunggah di G-Drive pada tanggal 15-17 Juni 2022

Pada tanggal 8 Juni 2022, ICCTF kembali menghadiri undangan BRIN untuk membahas persiapan penutupan proyek COREMAP-CTI. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Berikut adalah beberapa poin hasil pembahasan dari kegiatan ini:

- Dari ICCTF terkait penyerapan untuk kategori 3 masih ada kegiatan publikasi sampai bulan Juni. Akan dilaporkan setelah kegiatan. Status penyerapan untuk komponen 2 dan 3 sudah sekitar 98%. Untuk kategori 2 sudah tidak ada lagi penyerapan (sudah final).



Gambar 1.A.6. Diskusi penutupan proyek COREMAP-CTI

F

Media Visit Wisata Konservasi Berbasis Masyarakat di TNP Laut Sawu, NTT

dilakukan selama media visit ini meliputi:

- 22 Juni: Pengambilan footage terkait *underwater*, kegiatan Pokmaswas, pemberdayaan masyarakat (pengolahan sabun), dan tarian adat di Desa Oeseli.

Gambar 1.A.7.
Pengambilan
footage kegiatan
Pokmaswas



- 23 Juni: Pengambilan footage terkait pemberdayaan masyarakat pengolahan rumput laut, budidaya rumput laut, PLTS dan Landscape Dusun Nusa Manuk.



Gambar 1.A.8. Pengambilan footage pengolahan rumput laut menjadi agar-agar

- 24 Juni: Pengambilan footage terkait Pusat Informasi Ekowisata, pengolahan lawar rumput laut di Desa Oesina dan Landscape sunset di Kupang.



Gambar 1.A.9. Pengambilan footage di Pusat Informasi Wisata

- 25 Juni: Pengambilan footage terkait Dolphin Watching, Petani bawang dan pemberdayaan kelompok pengolah bawang goreng, serta landscape wisata pantai Pulau Semau.



Gambar 1.A.10. Pengambilan footage dolphin watching

G

Workshop Pembahasan Implementasi Completion Report (ICR) Program COREMAP-CTI

Pertemuan ini dilakukan pada tanggal 23 – 26 Juni 2022 di Semarang untuk membahas ICR Program COREMAP-CTI yang berasal dari *World Bank*. Beberapa hasil pembahasan dari kegiatan ini antara lain:



Gambar 1.A.11. Diskusi oleh peserta rapat

- Pada bagian PDO 1 terdapat masukan antara lain penggunaan indeks dalam penentuan *Reef Health Monitoring* (RHM) untuk lamun agar ada keseragaman dalam penulisan pelaporan dan perlu adanya penambahan grafik *time series* untuk mengetahui perubahan *trend* selama perjalanan COREMAP-CTI.
- Sedang dilakukan perbaikan terkait pembangunan infrastruktur yang statusnya saat ini sedang dalam proses administrasi pengelolaan dan pemanfaatan bangunan. Selain itu, program COREMAP-CTI ini juga meningkatkan status dari BBIL Mataram menjadi Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat.
- Terkait dengan kegiatan pemberian beasiswa dan pelatihan yang dilakukan oleh Pusbinbidiklatren-Bappenas, telah dilakukan pemberian beasiswa untuk 20 orang program master dan 188 orang *short term training*.
- Saat ini telah dilakukan *self assessment* nilai EVIKA untuk kawasan konservasi yang diintervensi oleh ICCTF dengan hasil optimum kecuali di Raja Ampat memiliki hasil *sustainability*. Nilai EVIKA yang dikeluarkan secara resmi oleh KKP, saat ini masih dalam proses dan rencananya akan diumumkan pada akhir tahun ini untuk selanjutnya diberikan ke *world bank* sebagai lampiran laporan.

B. COREMAP–CTI Asian Development Bank



Kegiatan PIU COREMAP - CTI ADB

A Meeting dengan Mahasiswa Master Degree

- Proses adaptasi mahasiswa di Australia dari segi budaya cukup mengalir saja.
- Kendala saat ini adalah akomodasi karena banyak yang sudah datang lebih dulu masuk Australia, selain itu minimal term adalah 6 bulan sehingga beberapa pemilik akomodasi memilih-milih.
- Prof. Paul *me-engage* mahasiswa untuk lebih gencar dalam menyelesaikan thesis. Mahasiswa sudah berkonsultasi dengan co-supervisor terkait pengambilan data.

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 4 April 2022. Agenda pertemuan ini adalah mengetahui update dari mahasiswa *Master Degree*. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:



Gambar 1.B.1. Diskusi dengan mahasiswa Master Degree

- Perlu kepastian waktu kunjungan monitoring di bulan Juni dengan Prof. Paul. Jadwal akademik semester ini berakhir antara tanggal 21 Juni hingga awal Juli. Kemungkinan monitoring akhir Juni atau awal Juli.
- Dibutuhkan foto mahasiswa di kampus untuk website ICCTF.

B Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program COREMAP-CTI ADB di Gili Matra

Kegiatan monitoring dan evaluasi GP 2 dan GP 5 diselenggarakan pada tanggal 7 April 2022 dan dibuka oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas. Beliau menyampaikan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan agar terdapat capaian kegiatan yang dapat disampaikan ke ADB saat *mid-term review*. Selanjutnya Koordinator Perikanan Bappenas memberikan paparan mengenai capaian indikator Gili Matra. Dalam paparan tersebut, rencana aksi yang perlu dilakukan oleh para mitra adalah:

- Finalisasi DED Pos Pemantau untuk mendapatkan persetujuan administrasi, teknis, dan finansial
- Finalisasi TOR Pengadaan peralatan dan speed boat serta peng adaan usaha hasil perikanan dan penangkapan ikan dan mendapat persetujuan Bappenas ICCTF

- Finalisasi kajian Cost Benefit Analysis dan pelaksanaan restorasi terumbu karang melalui pelibatan masyarakat
- Memastikan seluruh rencana kegiatan penyelesaian pekerjaan tersusun dan terlaksana sesuai waktu yang di sepakati

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan masing-masing mitra menyampaikan paparan capaian serta isu-isu yang ada dalam mengimplementasikan kegiatan proyek. Hasil diskusi dari masing-masing mitra adalah sebagai berikut:

GP2

- DED, SOP, dan VMS agar segera difinalkan.
- Progress VMS displit. Road to VMS -> gate as a system; Sistem -> on process, sudah ada dummy. Peran terbagi dua antara Pemda dan BKKPN. Pengelola dari VMS belum ditetapkan, penerima akan dijadikan admin
- Tagging penyu sudah dipesan. Perlu rencana matang jadwal tagging dan mitigasi karena tagging hanya bisa dilakukan saat penyu naik -> Musim naik penyu adalah bulan April-Juli, tagging tiba di Indonesia diperkirakan bulan Juni, perlu mitigasi karena waktu cukup sempit
- Dokumen PES masih berupa draft
- Pusat Informasi Ekowisata masih dalam penyesuaian karena di lokasi akan dibangun Port oleh Pemda, sehingga perlu sinkronisasi DED. Bidang asset akan

membuat surat atas nama Sekda yang menyebutkan bahwa akan dipergunakan oleh Dinas Pariwisata (lebih baik surat dari Dinas Pariwisata merefer surat dari Sekda). Perizinan menggunakan SPPL, dinas PU siap untuk backup administrasi setelah DED selesai. Perkiraan penyelesaian bangunan 2 bulan pada akhir Juli atau awal Agustus

- Submission progress report kemungkinan diundur

GP5

- SK Pokmaswas disahkan Kepala Dinas pada tanggal 6 April
- SOP penyaluran bantuan operasional ke kelompok: skema pengaplikasian yang akan dibangun dan konsultasi dengan Pemda agar berkelanjutan.
- Belum ada kesepakatan penerima speedboat karena spesifikasi speedboat harus sesuai dengan penerima
- BKKPN menyarankan untuk menjadikan speedboat sebagai asset desa, perlu dipastikan agar pokmaswas bisa mengelola dan memanfaatkan bantuan tersebut
- Design sudah disepakati, yaitu 1 lantai dengan dak. Sesuai penggunaan pemanfaatan ruang
- Memastikan tanda tangan Sekda diperbolehkan atau tidak, dan perlu didiskusikan kelanjutannya jika tidak boleh ditandatangani oleh Sekda



Gambar 1.B.2. Foto bersama seluruh peserta Monev program COREMAP-CTI di Gili Matra

C

Undangan Pertemuan Koordinasi Data Ilmiah untuk Penyusunan Draft Peta Jalan Harvest Strategy Perikanan Kakap dan Kerapu di WPPNRI 573

- Hal yang perlu dilakukan:
 1. Overview data kakap dan kerapu
 2. Penggabungan data dari mitra untuk analisis data
 3. Penyusunan rencana analisis data dan penyusunan draft dokumen
- Kakap dan kerapu di statistik masih masuk ke ikan karang
- Dari data panjang yang ada, yang baru dianalisis dua jenis kakap dan 2 jenis kerapu. Untuk kakap yang paling dominan jenis anggoli. Nilai SPR tahun 2020 masih diatas 30%, untuk data 2021 belum bisa dipakai karena data sangat sedikit (outlayer). Untuk kerapu sementara ini kurang bagus, nilai SPR semua dibawah 30%

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022. Agenda pertemuan ini adalah koordinasi data ilmiah untuk penyusunan draft dokumen *Harvest Strategy* perikanan kakap dan kerapu di WPPNRI 573. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:



Gambar 1.B.3. Diskusi data statistik dan hasil analisis data kakap dan kerapu

- Terkait pembandingan data produksinya, analisis data dari 12 spesies hanya spesies filamentosus yang menurun, lainnya relatif meningkat. Penangkapan spesies alimarginata, maniata dan gibus dikuasai oleh kapal GT kecil (one day fishing), sisanya oleh kapal GT besar (long trip).
- Masih perlu melengkapi data statistik sekaligus paralel dengan analisis data
- Basis data yang dibutuhkan per fishing ground bukan per landing base

D

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program COREMAP-CTI ADB di Gili Balu

indikator Gili Balu. Dalam paparan tersebut, beliau juga mengingatkan tentang Mid-Term Review oleh GEF-ADB dimana akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Penilaian/Asesmen capaian program dan keuangan terhadap capaian akhir project (target, indicator)
- Penilaian/Asesmen terhadap implementasi Adaptive Management untuk mencapai tujuan project
- Identifikasi resiko terhadap keberlangsungan project (program, finance, SDM, lingkungan, dll)
- Mempersiapkan saran/rekomendasi untuk perbaikan

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan masing-masing mitra menyampaikan paparan capaian serta isu-isu yang ada dalam mengimplementasikan kegiatan proyek. Adapun hasil dari diskusi dengan masing-masing mitra adalah sebagai berikut:

GP 3

SOP

- 2 SOP ditandatangani oleh Kadis Provinsi
- SOP karcis masuk cukup riskan dan disarankan untuk tidak dilanjutkan. Paling aman lewat BLUD untuk menetapkan tarif. Akan didiskusikan lagi 1 SOP yang akan ditetapkan dan perlu kejelasan pengganti SOP karcis masuk

Kegiatan monitoring dan evaluasi GP 3 dan GP 6 diselenggarakan pada tanggal 22 April 2022 dan dibuka oleh Koordinator Kelautan dan Perikanan Bappenas. Beliau menyampaikan arahan perlunya komitmen dari seluruh pihak dalam pelaksanaan kegiatan agar output-output yang ada dapat diselesaikan secara tepat waktu. Selanjutnya Direktur Eksekutif ICCTF memberikan paparan mengenai capaian



Gambar 1.B.4. Dokumentasi Monev Gili Balu

BLUD/Retribusi

- Hasil dari diskusi dengan DKP NTB mendorong semua kawasan konservasi untuk dijadikan BLUD. Sudah ada tim penyusun untuk penilaan kawasan konservasi untuk di BLUD kan. Provinsi menginisiasikan untuk mempercepat pembentukan BLUD
- DKP meminta untuk ada perwakilan COREMAP sebagai salah satu anggota dari tim dalam pembentukan BLUD
- Pemda Kab. Sumbawa Barat sudah menarik retribusi sesuai dengan Perda termasuk di kawasan Gili Balu. Perlu di tetapkan tarif parkir di tengah laut untuk wisatawan/ kapal yang singgah di wilayah Gili Balu
- Tidak ada celah di perda maupun lainnya untuk menarik retribusi di kawasan konservasi sehingga BLUD menjadi alternative dari pengganti penarikan retribusi di kawasan konservasi

Infrastruktur

- SK bupati untuk pondok informasi sudah ada, bisa dibangun sekitar 1 are. DED masih dalam proses revisi, pengadaan dan pembangunan dilakukan di bulan Juni – Juli
- KKPRL Mooring Buoy masih dalam tahap verifikasi kembali, dibantu dengan DKP (atas nama DKP). UKL UPL juga atas nama DKP, tapi dibackup tim mitra. Mei dimulai UKL UPL paling lama 3 bulan selesai, proses pengadaan cukup cepat. Diharapkan Juli sudah dipasang
- Penerimaan manfaat (Pondok Informasi Ekowisata) akan diterima oleh Dinas Pariwisata Kab. Sumbawa Barat

GP 6

Mangrove

- GP 6 Memperbaiki 50% dari kerusakan hutan mangrove yang ada di kawasan Gili Balu dengan jumlah 20.000 pohon mangrove
- Mangrove 95% sudah selesai -> sudah penanaman, sudah peresmian, dan ada monitoring serta penyulaman ulang
- Laporan monitoring restorasi mangrove dilaporkan dalam bentuk dokumen pada saat pelaporan

Perikanan

- Untuk pengolahan perikanan tuna sangat menjanjikan akan tetapi di kawasan gili balu masih kurang nelayan dalam penangkapan ikan tuna yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta sarana dan prasarana dalam kegiatan penangkapan

- Perlu dikaji ulang sebelum melakukan pelatihan pengolahan hasil perikanan agar tidak terulang pelatihan yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk ke depannya diharapkan membina masyarakat khususnya UMKM pengelolaan hasil perikanan
- Pengadaan alat tangkap skala kecil di lakukan di bulan pertengahan Mei. Penyerahan pengadaan alat tangkap skala kecil sebaiknya langsung diserahkan ke kelompok dengan menyediakan berita acara serah terima

Cost and benefit analysis

- Cost and benefit analysis sudah selesai namun belum dipresentasikan internal, diharapkan segera dibicarakan untuk presentasi internal terlebih dahulu

Pengawasan

- Pos Pengawas -> sudah ada calon vendor, dalam tahap negosiasi. Sudah mendekati final tinggal ttd dan pelaksanaan, disanggupi 3 bulan selesai pembangunan. Penerima manfaat dari Pembangunan 2 menara di Pulau Namu dan Paserang adalah DKP Provinsi NTB
- Penyerahan speed boat lebih baik diserahkan dahulu ke Dinas (CDK) selanjutnya nanti membuat berita acara dan surat perjanjian untuk di serahkan ke kelompok penerima manfaat (Pokmaswas)
- Ada 5 Pokmaswas, 4 sudah diintervensi, 2 yang akan dapat speedboat. Sudah ada SK Provinsi. Pokmaswas sering terkendala dalam pembiayaan untuk kegiatan pengawasan dan berharap ada dukungan biaya operasional dari COREMAP CTI

E

Rapat Pembahasan TOR Pengadaan dan Addendum Kontrak COREMAP-CTI ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan TOR pengadaan dan addendum pada GP3, GP4, dan GP6. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan masing-masing mitra mohon dapat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan
- Perubahan addendum diharapkan tidak mengganggu waktu dan lingkup pekerjaan
- Revisi TOR dan addendum dikirimkan kepada ICCTF pada tanggal 27 April 2022



Gambar 1.B.5. Pembahasan TOR dan addendum bersama PPK Satker MWA ICCTF

F

Mid-Term Review COREMAP CTI-ADB

16 Mei 2022, Community Meeting di Nusa Ceningan

Pelaksanaan kegiatan MTR yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022 di Nusa Ceningan telah dihadiri oleh UPTD, Kepala Desa Nusa Ceningan, Tim ADB, Bappenas, ICCTF, Mitra pelaksana (GP1 dan GP4). Tujuan pelaksanaan MTR ini disampaikan oleh Tim ADB yakni untuk melihat progress dari pelaksanaan proyek COREMAP CTI ADB yang sedang berlangsung dan sekaligus mendiskusikan terkait strategi atau langkah kedepannya yang perlu disiapkan untuk penyelesaian proyek.

Dalam pembukaan meeting ini Koordinator Perikanan Bappenas juga menyampaikan bahwa intervensi COREMAP-CTI ADB yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi Nusa Penida. Selain itu, Nusa ceningan merupakan salah satu lokasi

yang memiliki master plan ekowisata yang memiliki dukungan besar dari pemda.

Pada kegiatan ini dilakukan diskusi dengan Kelompok Pengolah Rumput Laut, Kelompok Pecinta Karang, Pokmaswas, dan Kelompok Mangrove. Kelompok pengolah kerupuk rumput laut memiliki anggota kelompok 15 orang, dan yang aktif 5 orang karena jumlah rumput laut yang kurang saat ini. Harapannya, kelompok dapat dibantu terkait dengan peralatan kelompok seperti alat pengulekan, pemotongan, dan juga kulkas (Freezer). Saat ini masih menggunakan kulkas masyarakat dengan kapasitas hanya sekitar 3 kg. Selain itu, marketing produk juga diharapkan untuk dapat dibantu dari proyek. Sebelum mengolah, masyarakat hanya pembudidaya rumput laut,

Dinas UMKM sudah cukup sering bertemu dengan kelompok, terutama dalam hal pelatihan. Tantangan pembudidaya rumput laut yang ada di Nusa Ceningan adalah penyakit ice-ice yang terjadi sekitar bulan Mei-Juli setiap tahun. Proses administrasi belum terkelola dengan baik, hanya anggota yang berpartisipasi yang akan mendapat pembagian keuntungan.



Gambar 1.B.6 Community Meeting Nusa Ceningan

Kelompok Pecinta Karang memiliki anggota 28 orang dan rata-rata anak muda. Sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan, baik Kerjasama dengan NGO, Swasta maupun dengan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan yakni rehabilitasi karang, dengan beberapa metode yang dilakukan seperti reef star, metode tali, table methods, dll. Selain itu kegiatan edukasi juga dilakukan di sekolah seperti materi konservasi dan juga terkait sampah. Kelompok ini sudah di legalisasi dari tingkat desa dan juga DKP. Asal bibit karang yang digunakan adalah dari CV Aquarium. Tingkat keberhasilan jika menggunakan reef star yakni sekitar 100% dan jika metode yang menggunakan tali keberhasilannya sekitar 97%. Dalam project coremap menggunakan metode reefstar. Kedalaman transplantasi dilakukan pada kedalaman 2-4 meter, dan juga 6-10 meter daerah lokasi transplantasi.

Pembentukan pokmaswas sejak tahun 2006 melalui DKP, saat ini beranggotakan 34 orang dan kemudian mendapat bantuan dari proyek COREMAP CTI. Kegiatan yang dilakukan selain melakukan kegiatan pengawasan adalah melakukan kegiatan rehabilitasi. Pokmaswas ini sudah dibantu Boat, akan tetapi masih keterbatasan pada biaya operasional pokmaswas. Pokmaswas ada 2 yakni di Lembongan dan di Nusa Penida. Hasil pengawasan ditemukan masih adanya pelanggaran yang terjadi misalnya bias. Boat bisa digunakan untuk ekowisata atau kegiatan lain, bisa di atur dalam SOP, namun harus diperjelas terkait apa yang boleh dan tidak boleh. Terutama saat pembahasan SOP antara masyarakat dengan Pengelola kawasan (UPT). Kegiatan kelompok mangrove yakni terkait dengan edukasi dan kegiatan rehabilitasi mangrove. Kegiatan lain yang dilakukan yakni mangrove tour.

17 Mei 2022, Stakeholder Meeting di Nusa Nusa Penida

Agenda pembukaan pada meeting stakeholder telah dihadiri oleh Kepala UPTD MPA Nusa Penida, ADB dan juga dari Bappenas. Dalam penyampaian, Kepala UPTD menyambut baik adanya kegiatan MTR yang dilakukan, selain itu juga disampaikan bahwa adanya pelaksanaan COREMAP – CTI yang telah dilaksanakan oleh GP1 dan GP4 di Nusa Penida memberikan dampak yang sangat besar bagi

pengelolaan kawasan. Beberapa kegiatan telah selesai dilaksanakan seperti penyusunan COC (Code of Conduct) untuk wisata Mola Mola, kegiatan pelatihan maupun kegiatan rehabilitasi. Selanjutnya, dalam pembukaan meeting ini juga, Koordinator Perikanan Bappenas juga menyampaikan bahwa intervensi COREMAP-CTI ADB yang dilakukan adalah penguatan

kelembagaan dan penegelolaan terumbu karang, pengembangan pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem, serta peningkatan mata pencaharian berkelanjutan berbasis kelautan.

Beberapa capaian yang sudah dihasilkan dari pelaksanaan proyek COREMAP CTI ADB di Nusa Penida seperti tersedianya SOP, E-TICKET untuk pelayanan online tiket tamu, tersedianya dokumen jasa lingkungan ekosistem (perda retribusi), COC mola-mola, pondok informasi (masih berupa DED, belum dilakukan pembanguan), Pos pengawasan (masih berupa DED, belum dilakukan pembangunan), penyediaan sarpras operasional pokmawas dalam monitoring sedang diproses, kegiatan rehabilitasi terumbu karang akan dilaksanakan di bulan juni, kajian kajian terkait ekosistem terumbu karang dan mangrove dalam proses penyusunan dokumen, pelatihan (2 pelatihan pokmaswas, 2 kali pelatihan pengolahan rumput laut, dan pelatihan rehab karang dan rehab mangrove), selain itu juga yang menjadi capaian saat ini adalah tersedianya materi publikasi.

Hal yang perlu diperhatikan adalah Mitra pelaksana diharapkan dapat memberikan info yang dibutuhkan Tim ADB termasuk specialist dan konsultan MTR, Perluanya dukungan lintas sectoral dalam rangka sustainability, serta mitra pelaksana dapat berkoordinasi dengan Bappenas - ICCTF untuk menindaklanjuti pelaksanaan MTR.

PT. Trans Intra Asia (GP1) mengerjakan 10 kegiatan utama yakni penyusunan SOP, naskah akademik, FGD Perda retribusi, COC Mola, Kajian daya dukung, Kajian persepsi pelaku wisata, Tourism Monitoring System, Perda retribusi, Pelatihan ekowisata, bangunan dan papan informasi. Dalam pelaksanaannya masih ada 3 kegiatan yang memiliki capaian belum sampai 100% yakni (TMS 83%, Pelatihan ekowisata 50% dan bangunan dan papan informasi 50%). Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh GP1 juga memperhatikan keterlibatan Gender. Setiap pelaksanaan



Gambar 1.B.7 Stakeholder Meeting Nusa Penida

kegiatan, keterlibatan perempuan menjadi salah satu indikator. Walaupun dalam pelaksanaannya, ada faktor yang menjadi kendala dalam perlibatan gender seperti terjadinya perbedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan antara laki laki dan perempuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan dampak dari ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma, ataupun struktur masyarakat. Sedangkan faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan perlibatan gender yakni adanya kebijakan pemerintah yakni instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang pengarusutamaan Gender. Beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan yakni adanya PPKM darurat, keterlambatan dana (cash flow) yang terbatas untuk mekanisme pre-financing, kemampuan para ahli dalam menulis laporan singkat dengan 2 versi Bahasa.

Coral Triangle Center (CTC) (GP4) menyampaikan kegiatan rehabilitasi karang dan mangrove masih dalam progress (40%), kegiatan ini sudah dilakukan terkait survey baseline, desiminasi, metode rehabilitasi dan kelompok masyarakat yang akan melakukan rehabilitasi. Selain itu, pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi produk rumput laut (sertifikat PIRT dan/atau Halal) masih dalam progress (50%). Pelatihan peningkatan kapasitas 3 kelompok Livelihoods di Nusa Penida masih berprogress dengan capaian sekitar 10% hingga Mei 2022. Output terkait materi penyadartahuan masyarakat dan materi publikasi seperti lesson learn dan best practices masih belum dilaksanakan. kegiatan

pembangunan infrastruktur masih berproses sekitar 20%. Progress saat ini sudah tersedia surat kesediaan menerima asset dari pemprov Bali dan Pemkab Klungkung serta berita acara kesepakatan dan dukungan dari masyarakat di Batununggal. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh GP4 juga memperhatikan keterlibatan Gender. Dari total sekitar 1.006 keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sekitar 20% perlibatan perempuan (224 orang). Beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan yakni adanya PPKM darurat, keterlambatan dana

(cash flow) yang terbatas untuk mekanisme pre-financing, kemampuan para ahli dalam menulis laporan singkat dengan 2 versi Bahasa. Beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh GP4 pada Q1-Q2 2022 adalah survey (patrol pengawasan berbasis masyarakat), pembuatan media tanam untuk rehabilitasi terumbu karang, pembuatan media tanam untuk rehabilitasi mangrove, pendampingan sertifikasi produk seaweed untuk mendapatkan sertifikat PIRT dan Halal, serta pembangunan infrastruktur pos pengawasan, tracking mangrove, Bird watching tower dan papan informasi.

18 Mei 2022, Community Meeting di Gili Trawangan

Pelaksanaan kegiatan proyek COREMAP CTI ADB untuk MPA Gili Matra telah dilaksanakan oleh GP2 dan GP5. Pelaksanaan kegiatan MTR yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022 dihadiri oleh Tm ADB, Bappenas, ICCTF, Mitra pelaksana (GP2 dan GP5), kepala desa, serta masyarakat penerima manfaat (kelompok pengolahan, pokmaswas, pokdarwis, kelompok nelayan dll).

Kelompok pengolah kerupuk ikan terletak di Gili Meno sedangkan kelompok pengolah produksi abon berada di Gili Air. Kedua kelompok ini sudah mendapatkan pelatihan dari proyek COREMAP CTI ADB. Pelatihan tersebut diantaranya pelatihan pengolahan perikanan, pelatihan packaging, dan pelatihan pemasaran produk. Kedua kelompok ini berharap dapat mengembangkan hasil olahan produk kelompoknya. Selain itu juga, berharap adanya olahan produk yang lainnya. Kelompok pembuat bakso ikan sudah melakukan pemasaran produk sampai ke Lombok Barat. Untuk menunjang kelompok, beberapa peralatan sudah diusulkan ke proyek untuk pengadaan.

Produk olahan kelompok tidak menggunakan bahan pengawet. Jumlah anggota perkelompok terdiri dari 13 orang. Setiap anggota juga sudah berkomitmen tetap melanjutkan kegiatan kelompok. Modal kelompok juga diperoleh dari setiap anggota yang ikut dalam proses

pengolahan. Pembagian keuntungan juga dilakukan sesuai dengan kehadiran dan kontribusi dari anggota kelompok. Saran untuk pengelolaan bakso ikan sebaiknya packaging produknya divakum, sehingga ketahanan produknya bisa tahan lama.

Jumlah anggota kelompok pokdarwis terdiri dari 24 orang. Pokdarwis sudah di SK kan, anggota terdiri dari 3 pulau yang ada di Gili Matra. Kelompok ini terdiri dari pemuda yang ada di Gili Matra. Pembagian tugas dilakukan kepada setiap divisi, misalnya anak muda untuk media sosial marketing, senior lebih banyak ke pemandu, dll. Divisi yang aktif sampai saat ini masih divisi konservasi. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kelompok seperti membuat SOP wisata selam dan pembatasan kuota kunjungan wisata, akan tetapi masih dalam pembahasan dokumen. Beberapa pelatihan yang dibutuhkan untuk pengembangan kapasitas anggota Pokdarwis adalah pelatihan ekowisata dan pelatihan rehabilitasi sumberdaya.

Jumlah anggota pokmaswas yang terdaftar dalam SK yakni sekitar 30 orang. Beberapa pelatihan sudah didapatkan seperti Cyber Tracker. Selain dari proyek COREMAP CTI ADB, pelatihan juga didapatkan dari NGO seperti WCS IP dan juga dari BKKPN. Tugas dan fungsi dari POKMASWAS adalah mencatat, mengawasi

dan melaporkan. Kolaborasi dengan stakeholder sudah dilakukan. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh POKMASWAS terdapat beberapa temuan yang dihasilkan seperti penyelaman kompresor dan pelanggaran zona (nelayan memasuki zona larang tangkap).

Kelompok pengelola sampah merupakan kelompok yang dibawah oleh Bumdes dan telah bekerjasama dengan Karang

Taruna. Kelompok ini terdiri dari beberapa anggota, dan sudah bekerjasama dengan 40 pengusaha di Gili Trawangan. Sistem kerja dari kelompok pengelola sampah adalah mengumpulkan sampah dari setiap pengusaha di pulau (misalnya café, resto dll), kemudian di kumpulkan sesuai dengan karakteristik sampah dan di angkut ke daratan utama Lombok. Kelompok ini sudah memiliki 1 perahu yang digunakan sebagai transportasi untuk mengangkut sampah dari pulau.

Kelompok restorasi Terumbu karang telah mencakup 3 Gili yakni Gili Meno, Gili Air



Gambar 1.B.8 Dokumentasi Community Meeting Gili Trawangan

dan Gili Trawangan. Kelompok restorasi ini sudah melakukan beberapa kegiatan restorasi. Kebanyakan kerusakan terumbu karang di Gili Matra disebabkan oleh gelombang tinggi. Harapannya kelompok ini dapat melakukan restorasi pada tempatnya dapat memberikan dampak perubahan terhadap sumberdaya yang ada. Kelompok ini sudah ada beberapa kali pelatihan yang didapatkan dari GP5. Selain itu, kegiatan penyadartahuan juga dilakukan oleh kelompok, terutama kepada anak muda muda yang ada di desa dengan harapan bahwa mereka akan lebih memahami dan mengerti terkait sumberdaya kelautan.

19 Mei 2022, Community Meeting di Gili Balu

Kelompok Pokmaswas terdiri dari 5 kelompok yang terdapat di Gili Balu dengan masing masing anggota setiap kelompok 10 orang. Kelima kelompok tersebut sudah mendapatkan legalitas (SK) dari pemerintah provinsi dalam hal ini adalah DKP. Pokmaswas Gili Balu telah mendapatkan beberapa pelatihan, selain pelatihan untuk kegiatan pengawasan, juga telah dilatih untuk kegiatan pemandu wisata. Dalam kegiatan pengawasan, kemitraan oleh kelompok pokmaswas telah dilaksanakan seperti dengan CDK, NGO (WCS IP).



Gambar 1.B.9. Community Meeting Gili Balu

Kegiatan patrol (pengawasan) yang dilakukan oleh pokmaswas 2 kali sebulan. Metode yang dilakukan adalah dengan smart patrol. Hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pokmaswa menunjukkan adanya penurunan pelanggaran yang ditemukan di Kawasan konservasi Gili Balu, terutama pelanggaran Destructive Fishing (tahun 2021 hanya ada satu pelanggaran). Sedangkan pelanggaran yang sering ditemukan di kawasan adalah adanya pelanggaran zona yang dilakukan oleh nelayan. Pelanggaran tersebut yakni melakukan kegiatan penangkapan ikan di zona larang tangkap. Untuk pengelolaan sumber daya ikan sudah ada awig-awig di Gili Balu.

Kelompok pengolahan Abon ikan, dengan anggota sekitar 10 orang. Dukungan proyek yang sudah didapatkan seperti pelatihan, peralatan untuk pengolahan Abon. Marketing abon sudah sampai ke Jakarta. Jumlah produksi

sudah mencapai 1000 bungkus. Pengurusan PIRT dan sertifikat Halal, semuanya difasilitasi dari Proyek. Selain penjualan langsung, juga dilakukan penjualan secara online. Terdapat uang kas yakni 150rb/kelompok. Pengelolaan sarana prasarana untuk pengolahan sudah menggunakan dana dari kelompok. Kelompok Sudah mendapatkan pelatihan administrasi (keuangan), pemasaran, packaging dll. Kebanyakan pelatihan didapatkan dari DKP.

Kelompok sadar wisata di Gili Balu sudah memulai mempromosikan pariwisatanya sejak tahun 2021 dan memiliki motivasi untuk memajukan pariwisatanya 5 tahun kedepan. Pokdarwis Gili Balu lebih memasarkan produk kuliner. Pokdarwis membutuhkan pelatihan terkait hospitality tamu dan pelatihan pengelolaan pariwisata. Pengembangan pariwisata yang ingin dikembangkan yakni base community implementator.

20 Mei 2022, Stakeholder Meeting di Mataram

Dalam sambutan oleh Sekretaris DKP Provinsi NTB telah disampaikan bahwa, kegiatan proyek COREMAP CTI ADB merupakan salah satu proyek yang cukup membantu pengelola kawasan. Rencana DKP saat ini adalah terkait bagaimana memaksimalkan Cabang Dinas Kelautan (CDK) saat ini untuk meningkatkan status nye menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, Sekretaris Dinas juga menyampaikan untuk kedepannya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola kawasan dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan paparan capaian masing-masing mitra dan diskusi terkait implementasi program ke depan.

Dalam diskusi GP2, Sekdis DKP NTB menjelaskan SOP tiket masuk tidak disetujui karena pengelolaannya masih dalam bentuk CDK. Untuk menuju BLUD sudah membentuk tim (admin, teknis, dan substansi) dan akan



Gambar 1.B.10. Stakeholders Meeting di Mataram

dilaksanakan FGD dengan KKP dan Kemendagri untuk mengidentifikasi proses/langkah menuju BLUD. Tiket masuk sebenarnya sudah ada perda. Yakni Perda no. 5, akan tetapi pengelola kawasan belum sebagai BLUD. Telah dilakukan self-assessment, dan akan memakai hasil resmi yang dilakukan oleh KKP sekitar bulan Juli atau agustus. Terdapat NGO yang masih aktif dalam melakukan pendampingan kelompok masyarakat ataupun Pemerintah daerah.

Dalam diskusi GP5 dijelaskan bahwa penentuan lokasi restorasi terumbu karang dengan penentuan data baseline (diperoleh dengan hasil survey). Pengadaan kapal pengawasan atau asset siap diterima Pemda dan bertanggung jawab untuk operasional asset tersebut. Pengelola Sarpras pengawasan sudah dilakukan pertemuan dengan Desa akan diterima dan dikelola oleh pokmaswas sendiri. Pengolahan ikan perlu koordinasi dengan DKP terutama peningkatan pada bidang daya saing untuk pemasaran produk kelompok. Terkait pengawasan tidak boleh membangun bangunan di sepadan pantai. Provinsi tidak ada lagi budget untuk operasional pokmaswas, oleh karena itu

ke depannya harus ada surat hibah, sehingga bisa mengajukan dana operasional pokmaswas. Terkait safeguard, pengurusan dokumen perijinan dan lingkungan perlu di siapkan, hal tersebut menjadi persyaratan pemerintah indonesia maupun juga donor (ADB). Lokasi Pos Pengawasan harus dipastikan, terutama di rencana tata ruang dan RZWP3K-nya. Material bangunan yang akan dipakai mengutamakan material yang ramah lingkungan dan legal.

Dalam diskusi Diskusi GP6 dijelaskan bahwa perhitungan valuasi ekonomi dilakukan terhadap manfaat langsung dan juga tidak langsung dari keberadaan mangrove.

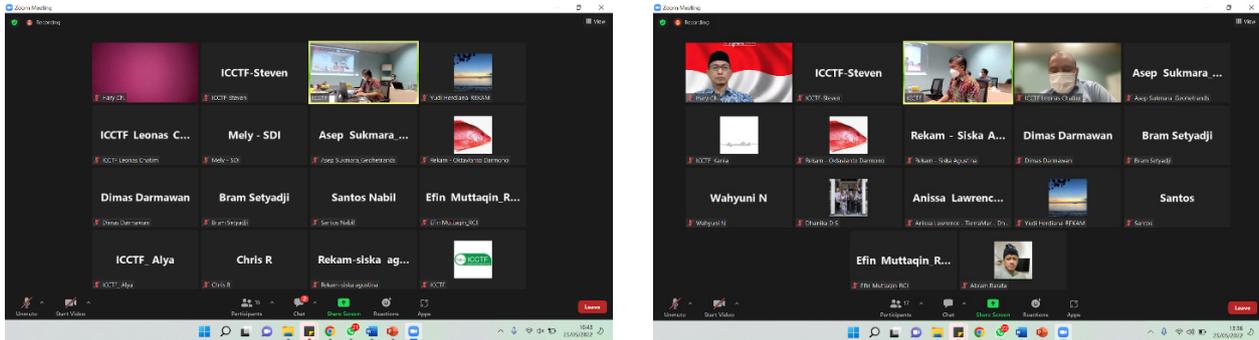
24 Mei 2022, MTR Master Degree di IPB

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas dengan menyampaikan tujuan pelaksanaan MTR yakni melakukan review dan mendiskusikan pelaksanaan proyek secara keseluruhan baik administrasi maupun program COREMAP-CTI ADB. Para mahasiswa menyampaikan tantangan utama studi di luar negeri yaitu tidak banyak kontrol dari dosen dan hanya memberikan deadline tugas, tidak seperti di Indonesia. Selain itu juga tantangannya adalah time management karena akan mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Perbedaannya dengan lokal (kuliah di Indonesia), yakni berbeda manajemen waktu. Setelah itu

mahasiswa menjelaskan rencana selanjutnya, dimana terdapat 3 orang menjawab ingin melanjutkan S3 sementara 1 orang tidak mau.

Mahasiswa menjelaskan perbandingan MPA di Australia dengan MPA di Indonesia. Berdasarkan studi pustaka, MPA di luar sangat optimum pengelolaannya. Konservasi jenis sangat diperhatikan jika di Australia sedangkan di Indonesia belum banyak. Data data terkait MPA yang di Australia cukup memadai secara free. Akses data yang diakses secara mandiri, dengan alasan komunitasnya berkembang secara mandiri.

25 Mei 2022, MTR GP7 di Kantor ICCTF dan Zoom Meeting



Gambar 1.B.11. Ruang Zoom Meeting MTR GP7

Terkait produk rumput laut di masing-masing daerah, NTB sudah dibuat menjadi dodol, di Bali industri rumput laut dibuat menjadi fertilizer, sedangkan di NTT masih terbatas (kualitas perlu ditingkatkan). Kedepannya bisa dijadikan sebagai produk turunan. Rekomendasi yakni nilai tambah sesuai dengan karakteristik daerah. Perlunya penguatan daya saing, Indonesia sudah ada roadmap peraturan pemerintah terkait pengolahan rumput laut, akan tetapi sudah berakhir di tahun 2021. Krena kualitas belum terlalu baik, rumput laut kebanyakan dijual dalam bentuk mentah ke perusahaan. Hasil kajian ini perlu dijadikan sebagai bahan untuk rekomnedasi terhadap pemda dalam menambahkan edit value. Bibit rumput aut perlu dikembangkan melalui kultur jaringan. Permintaan China banyak permintaan untuk produk rumput laut sejak 2019. Alternatif yang dilakukan oleh masyarakat di Bali ketika adanya pandemi adalah dengan melakukan budidaya rumput laut.

NTT dan NTB memiliki karakteristik berbeda terkait perikanan kakap, NTB one day fishing dan tidak ada kapal kapal industry yang menangkap, fokusnya untuk komsumsi raw material. Selain itu, inkonsistensi produksi, sehingga sulit untuk ekspansi ekspor. NTT ada skala kecil dan skala industry (industri banyak ke luar seperti ke Surabaya dan Makassar). Progress penyusunan harvest staretgy 713 kakap

dan kerapu sudah dalam tahap finalisasi dan disusun sejak tahun 2020. WPP 573 harvest strategy masih dalam proses penyusunan. Tracking tools perlu mengecek terkait ancaman overfishing di lokasi MPA dampingan COREMAP CTI ADB.

Surat izin kapal mencapai Rp100 jutaan untuk kapal besar. Selain itu bahan bakar juga menjadi faktor utama dalam hal nilai harga menambah nilai operasional disbanding dnegan biaya investasi

MSC, Belum ada elaborasi, terkait strategic thinking. Oleh karena itu disarankan ada kajian tertentu terkait MSC. Saat ini kualitas ikan menurun sehingga banyak yang ditolak. Kegiatan penangkapan ikan tuna masih ada penitipan, tetapi sudah tidak bnyak. Kebanyakan setiap industry hanya melakukan pemindahan hasil tangkapan sesuai dengan perusahaan masing masing.

Terkait study bioekonomi, data pertumbuhan menggunakan data sekunder, data ekonomi menggunakan data survey yang dicek dengan data FGD. Belum ada proporsi yang pas, sehingga menggunakan fine toun. Seluruh kegiatan sudah melibatkan universitas lokal seperti Universitas Mataram dan Universitas Udayana untuk survey biofisik. Selain itu juga melibatkan pengelola kawasan sebagai pengguna utama data.

G

Pembahasan rencana addendum Grant Package 1



Gambar 1.B.12. Diskusi rencana addendum GP1

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2022 di Hotel Oria, Jakarta dengan agenda membahas rencana addendum oleh Grand Package 1. Hasil dari diskusi pada kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- Social dan environment Safeguard Nusa Penida sudah disetujui oleh ADB.
- Perkiraan penyelesaian pembangunan: 1 bulan persiapan (ijin, surat-surat, pencarian vendor), 2 bulan (pembangunan), 1 bulan (finishing dan pelaporan).
- Perlu dibuat kronologis perpindahan lokasi (kenapa berpindah-pindah) + timeline kegiatan yang akan dilakukan untuk justifikasi perpanjangan kontrak
- PT. TIA membutuhkan berita acara/ bukti bahwa desain yang diajukan sudah disetujui.
- Penyerapan PT.TIA saat ini 27%, justifikasi dari PT. TIA adalah karena COVID-19, sehingga banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan di hotel jadi tidak dilakukan
- Proses extension hanya dilakukan untuk proses pembangunan.
- Amandemen kontrak akan diperpanjang 4 bulan (1 bulan untuk persiapan administrasi, pembangunan 3 bulan), biaya yang bisa di claim 3 bulan. namun perlu diberikan timeline dan kronologis.
- PT.TIA Perlu mempersiapkan dokumen kronologis dan timeline kegiatan ke depan.

PROGRESS KEGIATAN MITRA PELAKSANA

1. Support for MPA Management and ETP NPOA Implementation

PAKET KEGIATAN 1

PT Trans Intra Asia (PT TIA) berkonsorsium dengan Yayasan Bahtera Nusantara

a. Sosialisasi dan Pelatihan Mekanisme E-Ticketing Pariwisata di Nusa Penida

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022 dengan agenda sosialisasi dan pelatihan mekanisme e-ticketing pariwisata kepada para dive operator di Nusa Penida, Bali. Berikut adalah poin-poin penting hasil dari pertemuan tersebut:

- Landasan hukum dari e-ticketing pariwisata ini adalah Perda Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha yang merupakan turunan dari Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- SOP pungutan retribusi jasa dan usaha pada Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Provinsi Bali, meliputi:
 1. SOP retribusi penerbitan karcis masuk KKP untuk kegiatan pariwisata alam perairan
 2. SOP retribusi penerbitan karcis masuk/tanda masuk KKP untuk kegiatan penelitian
 3. SOP retribusi penerbitan karcis masuk/ yanda masuk KKP untuk kegiatan pendidikan
 4. SOP retribusi kegiatan foto dalam KKP
 5. SOP retribusi kegiatan shooting film/dokumenter dalam KKP
- E-retribusi memanfaatkan integrasi sistem informasi online, website e-ticketing, verifikator dan Bank (Bank Pembangunan Daerah/BPD Bali) sebagai penerima bukti pembayaran/ transfer.
- E-Ticketing Pariwisata Bali dapat diakses melalui website Atixbali.com



Gambar 1.B.13. Penjelasan mekanisme e-ticketing pariwisata oleh Perwakilan BPN Bali

PAKET KEGIATAN 2

PT Duta
Cipta Mandiri
berkonsorsium
dengan PT Cakra
Buana Aghna
dan Yayasan
Ekosistem Gili
Indah/Gili Eco
Trust

a. Pembahasan Roadmap dan Finalisasi Tahapan Visitor Management System (VMS)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 April 2022 di Kabupaten Lombok Barat, NTB dan dihadiri oleh Koordinator BKKPN wilayah kerja TWP Gili Matra, Bupati Kabupaten Lombok Utara, Asisten II Sekda Kabupaten Lombok Utara dan perwakilan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Diskusi diawali dengan paparan oleh tenaga ahli dari VMS dan simulasi hasil sementara dari aplikasi VMS. Selanjutnya para stakeholder menyampaikan bahwa masing-masing instansi mereka memiliki pungutan/retribusi tersendiri untuk para wisatawan sehingga diharapkan melalui aplikasi VMS ini dapat mengkombinasikan pungutan masing-masing instansi tersebut sehingga tidak membingungkan wisatawan karena banyaknya pungutan yang harus dibayar. Hasil dari pertemuan ini adalah disepakatinya hal-hal sebagai berikut:

- VMS adalah sistem yang terintegrasi dengan aplikasi yang menjadi one gate system
- Dibutuhkan pertemuan selanjutnya untuk membahas teknis dengan OPD terkait
- Pertemuan selanjutnya diharapkan dapat melihat simulasi serta membahas regulasi



Gambar 1.B.14. Pembahasan VMS

b. Rapat Koordinasi Kolaborasi Pengelolaan TWP Gili Matra Dan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Di Provinsi NTB untuk Mendukung Kemitraan Pengelolaan TWP Gili Matra

Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada 18 April 2022 di Aruna Sengigi & Convention Lombok,

Sengigi. Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Staff BKKPN Kupang, BKKPN Kupang Wilker TWP Gili Matra, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB, Staff BKSDA Provinsi NTB, Bupati Kabupaten Lombok Utara, Asisten II Sekda KLU, Bappeda Kabupaten Lombok Utara, Bapenda Kabupaten Lombok Utara, BPKAD Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Wildlife Conservation Society (WCS) NTB, Akademisi Kelautan dan Perikanan UNRAM, ICCTF, PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant, Yayasan Ekosistem Gili Indah/Gili Eco Trust.

Hasil dari rapat koordinasi ini adalah kesepakatan Bersama oleh peserta rapat yang terlampir pada Berita Acara Kegiatan. Adapun poin-poin penting yang disepakati Bersama sebagai berikut:

- Status jejaring KKP di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat dilanjutkan untuk difasilitasi oleh COREMAP-CTI karena sudah dalam tahap penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Menteri dan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Gubernur NTB.

- COREMAP-CTI memfasilitasi dan mendorong Kemitraan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.21 Tahun 2015 dengan melakukan Kemitraan ke LSM, Korporasi dan Lembaga Penelitian, serta masih berpeluang kemitraan dengan Perguruan Tinggi.
- Melakukan rapat koordinasi dengan BKKPN Kupang dan Wilker TWP Gili Matra untuk Inventarisasi permasalahan KKP TWP Gili Matra, mitra potensial, dan program kemitraan prioritas.
- COREMAP-CTI memfasilitasi restrukturisasi Forum Koordinasi Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional TWP Gili Matra (FKKP TWP Gili Matra) sesuai dengan inventarisasi beberapa permasalahan yang belum optimal dalam implementasi program/rencana kerja.

c. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra

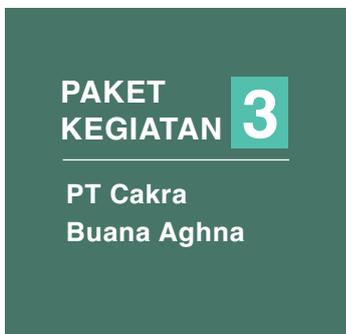
Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 25-26 April 2022 di lokasi yang berbeda. Lokasi pelaksanaan hari pertama bertempat di Villa Pulau Cinta, Gili Meno Desa Gili Indah, KLU NTB dan hari kedua bertempat di Gili Gaya Galary, Pemenang Kabupaten Lombok Utara, NTB. FGD in dihadiri oleh BKKPN Kupang Wilker TWP Gili Matra, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPD Gili Indah, Kepala Dusun Gili Air, Kepala Dusun Gili Meno, Kepala Dusun Gili Trawangan, Karang Taruna Desa Gili Indah, Kelompok Masyarakat Pengawas TWP Gili Matra (Ketua dan lainnya), Kelompok Sadar Wisata TWP Gili Matra (Ketua dan lainnya), Pemuda/i Pegiat Lingkungan dan Wisata Bahari di

Dusun Gili Air, Pemuda/i Pegiat Lingkungan dan Wisata Bahari di Dusun Gili Meno, Pemuda/i Pegiat Lingkungan dan Wisata Bahari di Dusun Gili Trawangan, Meno Dive Club (Instruktur), Blue Marlin Gili Trawangan, Manta Dive Gili Trawangan, Gili Eco Trust (Yayasan Ekosistem Gili Indah), Gili Shark Conservation / Coral Catch, Gili Island Diving Center (Instruktur/Pemandu Selam), Central Diving Indonesia (Instruktur/Pemandu Selam), Dolphin Dive School (Instruktur/Pemandu Selam), Bagus Divers (Instruktur/Pemandu Selam), WCS, dan PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant.

Kegiatan tersebut dimulai dengan sambutan dan pengantar dari ICCTF dan dibuka oleh Bupati

Lombok Utara. Selanjutnya pemaparan dan diskusi. Hasil diskusi menghasilkan kesepakatan Bersama yang dilampirkan dalam Berita Acara Kegiatan. Adapun poin penting rekomendasi untuk penyusunan draf SOP sebagai berikut:

- Hans Reef, Shark Point, Sunset Reef, Halik Reef, Shallow Turbo, Air Wall: 100%
- Bounty Wreck, Meno Slope, Turtle Heaven, Meno Wall, Air Slope: 30%
- Tekanan kegiatan wisata selam terhadap ekosistem terumbu karang merupakan jumlah penyelam berdasarkan jenjang kualifikasi dari setiap lokasi penyelaman
- Lokasi yang memiliki tingkat tekanan wisata selam yang tinggi adalah Halil Reef, Hans Reef, Shark Point, Sunset Reef, Shallow Turbo, dan Meno Wall, sehingga perlu dipertahankan sebagai zona pemanfaatan pariwisata dengan memperkuat pengaturan tata kelola pariwisata pada lokasi, yaitu dengan menetapkan daya dukung wisata selam scenario 30% dari luas pemanfaatan
- Kerusakan karang yang diakibatkan oleh kegiatan wisata selam umumnya ditemukan adalah broken branching coral



a. Koordinasi Penetapan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) Mooring TWP Gili Balu

Koordinasi dilakukan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna memperoleh Penetapan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) Mooring TWP Gili Balu. Koordinasi tersebut menghasilkan penetapan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) Mooring TWP Gili Balu dengan tanggal 18 Mei 2022, dengan nomor B.291/Men-KP/V/2022, yang mana secara prinsip memberikan ruang laut untuk memasang Mooring buoy di TWP Gili Balu.



Gambar 1.B.15. Dokumen konfirmasi kesesuaian ruang laut untuk penempatan mooring buoy

b. Audiensi Badan Layanan Umum Daerah TWP Gili Balu

Audiensi Badan Layanan Umum Daerah TWP Gili Balu diselenggarakan pada tanggal 11 April 2022 di Ruang Rapat Sekertaris Daerah, Mataram dan dihadiri oleh Perwakilan Kepala Dinas DKP NTB, Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP NTB dan Seksi yang ada dibawahnya, Cabang Dinas Kelautan Regional Sumbawa-Sumbawa Barat, Lombok dan Bima Dompu, dan Wildlife Conservation Society (WCS) Wilker NTB serta SKPD Provinsi NTB Terkait Penetapan BLUD yaitu Biro Ekonomi SETDA NTB, Biro Hukum SETDA NTB, dan Biro Organisasi SETDA NT, B Inspektorat Prov. NTB, dan BAPPEDA NTB. Beberapa catatan penting yang dihasilkan dalam audiensi tersebut yaitu:

- NTB memiliki 6 Kawasan konservasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian



- Potensi Kawasan Konervasi Sangat Besar namun Tidak Ada Payang hukum dalam memanfaatkan Kawasan konservasi Perairan sehingga Lembaga pengelola tidak dapat memanfaatkan secara maksimal oleh karena itu Pengelolaan Kawasan Konservasi diharapkan dapat berbentuk BLUD
- Pembentukan BLUD harus memenuhi 3 syarat utama yaitu substantive, administrative dan teknis
- BLUD harus sudah masuk kedalam RENSTRA DKP NTB
- Penerapan BLUD juga menjadi inovasi yang baik dalam pengelolaan khususnya dalam perspektif kelembagaan karena secara administrative baik program maupun keuangan akan transparan



Gambar 1.B.16. Audiensi BLUD Kawasan Perairan di NTB

c. Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan TWP Gili Balu

Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan TWP Gili Balu diselenggarakan pada Hari Senin tanggal 25 April 2022 di Grand Royal Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan dihadiri oleh Perwakilan Kepala Dinas DKP NTB, Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP NTB dan Seksi yang ada dibawahnya, Cabang Dinas Kelautan Regional Sumbawa-Sumbawa Barat, dan POKMASWAS dan

POKDARWIS di Sekitar TWP Gili Balu, Dinas Perikanan Sumbawa Barat, Serta Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga KSB Beberapa catatan penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut yaitu :

- Tidak Saran dan pendapat yang substansial dalam rencana pengelolaan di TWP Gili Balu
- Dibutuhkan Pendampingan dalam penjagaan, pengawasan dan pelestarian kawasan di TWP Gili Balu

- Pokdarwis membutuhkan bimbingan dan pelatihan dalam promosi pariwisata, pelatihan Diving serta butuh sarana dan prasarana dalam kegiatan Diving serta kegiatan wisata lainnya.
- Kelompok masyarakat khususnya Pokmaswas akan Siap dan selalu akan mendukung dari pemerintah dalam pengawasan di kawasan Gili Balu



Gambar 1.B.17. Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan TWP Gili balu

d. FGD Draft Konsep PES TWP Gili Balu

FGD Draft Konsep Pes TWP Gili Balu diselenggarakan pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 di Hotel Aston Inn, Mataram dan dihadiri oleh Perwakilan Kepala Dinas DKP NTB, Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP NTB dan Seksi yang ada dibawahnya, Cabang Dinas Kelautan Regional Sumbawa-Sumbawa Barat, akademisis Universitas Mataram dan 45 Mataram dan Wildlife Conservation Society (WCS) Wilker NTB dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Wilker NTB, Dinas Perikanan

Sumbawa Barat, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Sumbawa Barat, Polsus Perikanan Poto Tano, Desa, Pokmaswas, dan Pokdarwis Sekitar Gili Balu. Beberapa catatan penting yang dihasilkan dalam Pertemuan tersebut yaitu:

- BLUD adalah salah satu mekanisme penerapan PES yang tepat untuk diterapkan di TWP Gili Balu
- Penerapan BLUD harus didukung Lembaga dengan Status UPTD
- CDK Harus ditransformasi menjadi UPTD



Gambar 1.B.18. FGD Draft Konsep Framework PES Gili Balu

Pembahasan revisi draft konsep PES TWP Gili Balu dilanjutkan pada tanggal 9 Juni 2022 di Prime Park Hotel, Mataram dan dihadiri oleh Perwakilan Kepala Dinas DKP NTB, Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP NTB dan Seksi yang ada dibawahnya, Cabang Dinas Kelautan Regional Sumbawa-Sumbawa Barat, Cabang Dinas Kelautan Lombok dan Bima Dompus, Wildlife Conservation Society (WCS) Wilker NTB, Akademisi Fakultas Perikanan Universitas Mataram, Beberapa catatan penting yang

dihasilkan dalam Pertemuan tersebut yaitu :

- DKP NTB dalam proses akselerasi transformasi Kelembagaan Cabang Dinas Kelautan menjadi UPTD
- Dokumen Administrasi BLUD yang dibutuhkan ialah 1) Kesiapan untuk di audit, 2) Dokumen Standar Pelayanan Minimum, 3) Dokumen Tata Kelola, 4) Dokumen Rencana Strategis dan 5) Dokumen Rencana Bisnis Anggaran
- Terdapat Rencana 3 BLUD yang akan di bentuk dari 3 UPTD yang dibuat.



Gambar 1.B.19. FGD Draft Revisi Konsep Framework PES Gili Balu

e. Koordinasi Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen EVIKA TWP Gili Balu dan Penetapan Jenis SOP Pengganti TWP Gili Balu

Koordinasi Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen EVIKA TWP Gili Balu dan Penetapan Jenis SOP Pengganti TWP Gili Balu diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 2022 di Hotel Aston Inn, Mataram dan dihadiri oleh Perwakilan Kepala Dinas DKP NTB, Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP NTB, Seksi Pengawasan DKP NTB, Seksi Perizinan, dan Seksi Konservasi DKP NTB, Cabang Dinas Kelautan Regional Sumbawa-Sumbawa Barat (Seksi Tata Usaha, Pengawasan dan Konservasi), dan Wildlife Conservation Society (WCS) Wilker NTB Sekitar Gili Balu. Beberapa hasil penting yang dihasilkan dalam Pertemuan tersebut yaitu:

- SOP pengganti yang akan dibuat ialah SOP Penyadartahuan
- Dibutuhkan SK SDM di CDK terkait pembagian tugas pengelolaan kawasan yang mana penting untuk EVIKA serta pengelolaan kawasan
- Kolaborasi Data dan informasi khususnya data-data ekologi, dan sosial antara COREMAP-CTI GP3-WCS-DKP NTB
- Dibutuhkan fasilitasi perencanaan dan program Penjangkauan dan penyadartahuan untuk meningkatkan kepedulian serta meningkatkan EVIKA diKawasan
- Simulasi penilaian EVIKA TWP Gili Balu 2022 adalah 61,71 dengan status Dikelola Optimum



Gambar 1.B.20. Koordinasi Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen EVIKA TWP Gili Balu dan Penetapan Jenis SOP Pengganti TWP Gili Balu

f. Pelatihan Selam COREMAP-CTI GP3

Pelatihan Selam COREMAP-CTI GP3 diselenggarakan pada tanggal 11-13 Juni 2022 di Gili Trawangan, Lombok Utara dan dihadiri oleh 6 Perwakilan Cabang Dinas Kelautan Regional Sumbawa-Sumbawa Barat, 2 peserta dari kelompok masyarakat. Kedelapan Peserta telah mengikuti seluruh tahapan pelatihan selam dan dalam proses menunggu terbitnya Sertifikat Selam. Sertifikat selam yang diperoleh ialah sertifikat Open Water dengan Batas Penyelaman sedalam 18 meter.



Gambar 1.B.21. Pelatihan Selam COREMAP-CTI GP3

2. Support for Ecosystem-based Resource Management Plans and Sustainable Marine-based Livelihoods

PAKET KEGIATAN 4

Coral Triangle Center

a. Pelatihan Pengemasan dan Analisa Usaha Produk Olahan Rumput Laut

Pelatihan pengemasan dan analisa usaha produk rumput laut ini dilaksanakan selama tiga hari, dari tanggal 5-7 April 2022 yang terdiri dari penyampaian materi, diskusi kelompok, pengisian modul untuk praktik di dalam kelas, dan kunjungan lapangan.

Pelatihan ini menggunakan bahan ajar dari pelatih dengan menyediakan presentasi dan modul yang dikerjakan untuk mendukung pekerjaan individu maupun kelompok. Materi pelatihan terdiri dari tiga topik besar, (1) Identifikasi produk rumput laut yang akan dipilih; (2) Analisa Rencana Usaha dan Kemasan; (3) Analisa Rencana Pemasaran. Dengan mempertimbangkan latar belakang peserta seperti pekerjaan, tingkat pendidikan, dan pengalaman. Pelatih menerapkan metode pembelajaran orang dewasa. Pelatihan menerapkan serangkaian metode pembelajaran yaitu ceramah/presentasi, kerja kelompok, sesi tanya jawab, sesi berbagi pengalaman dan diskusi kelompok dengan saling memberikan masukan hasil kerjaan serta praktik di dalam dan di luar



Gambar 1.B.22. Grup foto pelatih, narasumber, dan peserta pelatihan pengemasan dan analisa usaha produk rumput laut

kelas. Secara keseluruhan, pelatihan berfokus untuk melakukan pekerjaan individu dan kelompok melalui pengisian modul untuk menggali informasi secara terarah dan menentukan produk yang akan dikembangkan serta analisa usaha produk rumput laut. Modul yang telah diisi oleh peserta akan menjadi pegangan peserta untuk mengembangkan produk rumput laut yang telah dianalisis selama pelatihan.

b. Patroli Pengawasan Berbasis Masyarakat Bersama Pokmaswas

Patroli Pengawasan Berbasis Masyarakat Bersama Pokmaswas di Kawasan Konservasi Nusa Penida dilakukan pada tanggal 19-22 April 2022 Mitra yang terlibat: 1) Pokmaswas Baruna Jaya, Desa Suana; 2) Pokmaswas Gili Bhuana, Desa Nusa Lembongan; 3) Unit Pengelola KKP Bali; 4) Polisi Laut Kabupaten Klungkung; 5) Pusat Segitiga Terumbu Karang; 6) ICCTF. Hasil dari aktivitas adalah sebagai berikut:

- Kegiatan ini merupakan bagian dari program COREMAP GP 4 dan juga merupakan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KKL yaitu dalam kegiatan monitoring

- Kegiatan ini dilakukan secara berurutan dan merupakan bagian dari upaya pelaksanaan pelatihan yang telah diberikan kepada pokmaswas di Nusa Penida
- Secara umum Pokmaswas di Nusa Penida telah mampu dan memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan bersama dengan unit pengelola KKP Bali
- Secara total, tercatat 189 pengguna selama empat hari pengawasan di KKP Nusa Penida, yang didominasi oleh nelayan dan wisatawan untuk menyelam dan snorkeling



Gambar 1.B.23. Patroli pengawasan berbasis masyarakat bersama Pokmaswas Baruna Jaya, Pokmaswas Gili Bhuana, UPT KKP Bali dan Polairud

Pada kegiatan Patroli periode bulan Mei:

- Secara total, tercatat 81 pengguna selama dua hari pengawasan di KKP Nusa Penida, yang didominasi oleh wisatawan untuk menyelam dan snorkeling. Cuaca yang cukup buruk dengan angin dan gelombang yang cukup kencang membuat tim patrol tidak bisa mengelilingi Pulau Nusa Penida secara keseluruhan demi keselamatan.
- Berdasarkan pengamatan selama 3 bulan terakhir, kunjungan wisatawan di Nusa Penida cukup meningkat drastis jika dibandingkan dengan data pengunjung pada tahun 2020, 2021 dan 2022 bulan Januari hingga Februari.
- Beberapa pelanggaran yang kita temukan antara lain adalah satu buah speedboat asal Sanur yang melempar jangkar di sekitar perairan dangkal, dan 2 buah speedboat yang melakukan snorkeling di wilayah zona inti (Tanjung Samuh).

Dilakukan patroli lanjutan pada tanggal 27-28 Juni 2022. Hasil dari kegiatan patrol ini antara lain:

- Total ditemukan sebanyak 139 armada wisata yang sedang beroperasi di wilayah KK Nusa Penida. Total wisatawan yang tercatat adalah sebanyak 864 orang yang didominasi oleh turis asing.
- Tim pengawasan tidak menemukan satupun aktivitas perikanan yang diduga karena kondisi cuaca cukup buruk (gelombang tinggi dan angin kencang) sehingga menyebabkan para nelayan tidak pergi melaut.
- Tim pengawasan menemukan dua pelanggaran di zona inti Tanjung Samuh yaitu dua kapal wisata yang sedang melakukan snorkeling dan sudah diberikan peringatan untuk pindah lokasi dan tidak mengulangi kegiatan serupa di kemudian hari.

c. *Dry Test* Speedboat Pengawasan dan Pengiriman Ke Nusa Penida

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 dan 24 Mei 2022. Pada saat dilakukan *dry test* di galangan kapal di Sidoarjo kondisi kapal sudah selesai dibangun dan siap dikirim menuju pulau Nusa Penida. Hanya ada beberapa



Gambar 1.B.24. *Dry test* dan pengecekan sebelum pengiriman speed boat

detil kecil yang perlu dilengkapi seperti *sun visor* pada bagian *deck captain* untuk menghindari cipratan air laut pada saat speedboat digunakan untuk meminimalisir karat pada setir, GPS dan gas mesin pada area *deck* kapten speedboat. Speedboat pengawasan saat ini sudah tiba di Nusa Penida dan diparkir di dalam pelabuhan Sampalan, Nusa Penida untuk menunggu arahan selanjutnya terkait serah terima kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Bali melalui UPT KKP Bali.

d. Koordinasi dan Implementasi Rehabilitasi Mangrove dan Terumbu Karang

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18-23 Mei 2022. Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan dengan para anggota kelompok diantaranya adalah kesepakatan terkait beberapa hal sebagai berikut:



Gambar 1.B.25. Pengerjaan struktur reef stars bersama kelompok Nuansa Pulau

- Jenis pekerjaan dan jumlah struktur yang harus dibuat dikarenakan setiap Desa memiliki jenis pekerjaan dan metode yang berbeda
- Besaran uang transport bagi masyarakat yang terlibat dan ikut bekerja
- Target waktu penyelesaian

e. Patroli Pengawasan Berbasis Masyarakat bersama Pokmaswas di Kawasan Konservasi Nusa Penida

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24-26 Mei 2022 dan menghasilkan beberapa informasi sebagai berikut:

- Kegiatan ini merupakan bagian dari program COREMAP GP 4 dan juga merupakan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan konservasi yaitu dalam kegiatan monitoring
- Kegiatan ini dilakukan secara berurutan dan merupakan bagian dari upaya pelaksanaan pelatihan yang telah diberikan kepada pokmaswas di Nusa Penida
- secara umum Pokmaswas di Nusa Penida telah mampu dan memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan bersama dengan unit pengelola KKP Bali
- Total tercatat 81 pengguna selama dua hari pengawasan di KKP Nusa Penida, yang didominasi oleh wisatawan untuk menyelam dan snorkeling. Cuaca yang cukup buruk dengan angin dan gelombang yang cukup kencang membuat tim patrol tidak bisa mengelilingi Pulau Nusa Penida secara keseluruhan demi keselamatan
- Berdasarkan pengamatan selama 3 bulan terakhir, kunjungan wisatawan di Nusa Penida cukup meningkat drastis jika dibandingkan dengan data pengunjung pada tahun 2020, 2021 dan 2022 bulan Januari hingga Februari
- Beberapa pelanggaran yang kita temukan antara lain adalah satu buah speedboat asal Sanur yang melempar jangkar di sekitar perairan dangkal, dan 2 buah speedboat yang melakukan snorkeling di wilayah zona inti (Tanjung Samuh)
- Tim patroli selalu mensosialisasikan terkait zonasi yang ada di dalam Kawasan konservasi perairan dan juga menyampaikan beberapa peraturan yang dibolehkan dan tidak dianjurkan untuk



Gambar 1.B.26. Salah satu anggota tim pengawasan sedang melakukan patroli

dilakukan kepada para pelaku wisata yang melanggar zonasi

f. Koordinasi dan Implementasi Rehabilitasi Mangrove dan Terumbu Karang

Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan dengan para anggota kelompok diantaranya adalah kesepakatan terkait beberapa hal sebagai berikut:

- Lokasi pengerjaan di masing-masing Desa
- Jenis pekerjaan dan jumlah struktur yang harus dibuat dikarenakan setiap Desa memiliki jenis pekerjaan dan metode yang berbeda
- Besaran uang transport bagi masyarakat yang terlibat dan ikut bekerja
- Target waktu penyelesaian

Semua jenis pekerjaan yang berkaitan dengan program kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang diestimasi akan selesai pada minggu ke-2 bulan Juli. Selanjutnya pada dua minggu terakhir bulan Juli dan dua minggu pertama bulan Agustus akan dilaksanakan proses penanaman mangrove dan penurunan struktur media rehabilitasi di tiga Desa berbeda yaitu Desa Suana, Desa Ped, dan Desa Lembongan. Semua masyarakat yang turut andil dan ikut bekerja dalam berbagai jenis kegiatan di atas akan mendapatkan uang transport sebesar Rp.150.000 per hari yang dibuktikan dengan daftar hadir, fotocopy ktp dan dokumentasi foto kegiatan.

PAKET KEGIATAN 5

PT Duta
Cipta Mandiri
berkonsorsium
dengan PT Cakra
Buana Aghna,
PT Ciriayasa
Engineering, dan
Yayasan Ekosistem
Gili Indah/Gili Eco
Trust



Gambar 1.B.27. Project Coordinator GP5 Memberikan Sambutan Pada Kegiatan Diskusi

a. Kesepakatan Penerima Sarana Pokmaswas di TWP Gili Matra

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 26 April 2022 di Gili Air Lagoon Resort, Gili Air. Kegiatan dihadiri oleh BKKPN, Pemerintah Desa, dan anggota Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Gili Matra dengan kesepakatan yang tertulis dalam Berita Acara adalah sebagai berikut:

- Sarana Pokmaswas yang diberikan oleh program COREMAP-CTI ADB Bappenas akan diterima, dikelola, dan dirawat oleh Pokmaswas Gili Matra
- Pokmaswas Gili Matra selanjutnya akan membuat Surat Kesediaan Menerima dan Mengelola Sarana Pokmaswas yang akan diberikan oleh program COREMAP-CTI ADB Bappenas
- Sarana yang telah diserahkan nantinya merupakan aset kelompok bukan perorangan
- Sarana yang akan diberikan harus digunakan sebaik mungkin untuk

memaksimalkan kegiatan pengawasan di kawasan TWP Gili Matra, namun jika sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya maka sanksi akan diatur dalam SOP yang akan disusun lebih lanjut

- Sarana Pokmaswas yang diberikan oleh program COREMAP dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional Pokmaswas dan akan diatur lebih lanjut dalam SOP pemanfaatan Sarana Pokmaswas

Sebelumnya, telah ada kesepakatan bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) akan menerbitkan SK Kelompok Restorasi yang membawahi tiga pulau (Gili Meno, Air, dan Trawangan). Kelompok ini terdiri dari 22 anggota dimana nantinya memiliki tugas untuk melaksanakan rehabilitasi, memelihara terumbu karang, dan membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem terumbu karang yang berkelanjutan. Kelompok ini nantinya akan menerima bantuan aset berupa media restorasi.

b. Lokakarya Kesepakatan Serah Terima, serta Perawatan dan Pengelolaan Peralatan Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan di Kawasan TWP Gili Matra

Pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2022, bertempat di Ruang Meeting Hotel Lagoon Resort – Gili Air, telah dilakukan Lokakarya Kesepakatan Serah Terima, serta Perawatan dan Pengelolaan Peralatan Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan di Kawasan TWP Gili Matra dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai dimana peralatan dititipkan hingga dilakukan pemeriksaan oleh pihak terkait; siapa yang akan menerima peralatan; dimana peralatan akan disimpan setelah dilakukan pemeriksaan; bagaimana perawatan dan pengelolaan peralatan; dan sebagainya. Selain itu, melalui lokakarya ini juga akan dilakukan identifikasi terhadap perkembangan produk olahan pada setiap kelompok pengolah dan pemasar ikan, serta akan disampaikan pula perkembangan pendampingan PIRT dan sertifikat halal. Kegiatan lokakarya ini dihadiri secara offline oleh BKKPN Kupang Wilayah Kerja Gili Matra; Penyuluh Perikanan Kabupaten Lombok Utara; Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara; Pemerintah Desa Gili Indah (Kepala Desa dan Kepala Dusun); Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan Lanter Gili; Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan Putri Bahari; Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan Karya Bunda Meno; dan Perwakilan ICCTF.

Kegiatan lokakarya dibuka oleh perwakilan BKKPN Kupang Wilayah Kerja Gili Matra. Pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa barang-barang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat harus melalui tahap penyerahan, pemeriksaan, perawatan, dan monev. Setiap kelompok masyarakat yang mendapatkan barang bantuan harus melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap barang yang diberikan, serta diharapkan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan usaha yang dilakukan.

Perwakilan dari BKKPN Kupang Wilayah Kerja Gili Matra mengingatkan kepada kelompok pengolah dan pemasar ikan bahwa setiap 3-6 bulan sekali akan ada monev yang dilakukan oleh pihak Wilker Gili Matra untuk memastikan bahwa setiap kelompok pengolah dan pemasar ikan menggunakan barang bantuan yang diberikan dengan sewajarnya dan melakukan perawatan, serta akan dilakukan pula identifikasi mengenai perkembangan usaha pengolahan ikan yang dilakukan.

Setelah pembukaan dari perwakilan BKKPN Kupang Wilayah Kerja Gili Matra, kegiatan selanjutnya adalah melakukan kesepakatan terkait serah terima barang yang dipandu oleh Post Harvest Management Expert (PHME) dari GP5. Pada kegiatan tersebut, dilakukan beberapa kesepakatan, yaitu:

- Setiap kelompok siap untuk menanggung biaya listrik peralatan elektronik yang diberikan.
- Setiap kelompok bersedia melakukan perawatan seluruh peralatan yang diberikan (melakukan perawatan rutin, service, dan lain sebagainya).
- Kegiatan produksi olahan ikan akan dilakukan di rumah salah satu anggota kelompok yang memiliki daya listrik yang memadai, dengan rincian: 1) Kelompok pengolah dan pemasar ikan Putri Bahari akan melakukan produksi abon ikan di rumah Ibu Rohanisa yang memiliki daya listrik 2.200 kwh; 2) Kelompok pengolah dan pemasar ikan Lanter Gili akan melakukan produksi bakso ikan di rumah Ibu Eka Suriyani yang memiliki daya listrik 5.000 kwh; 3) Kelompok pengolah dan pemasar ikan Karya Bunda Meno akan melakukan produksi kerupuk ikan di rumah Ibu Nurhaini yang memiliki daya listrik 5.500 kwh.
- Setiap kelompok bertanggung jawab terhadap peralatan yang diberikan, diantaranya adalah melakukan identifikasi

kerusakan peralatan secara rutin. Segala bentuk kerusakan dari peralatan yang telah diberikan harus menjadi tanggung jawab kelompok.

- Pihak BKKPN Kupang Wilayah Kerja Gili Matra akan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin (3-6 bulan sekali).
- Pihak Pemerintah Desa, Penyuluh Perikanan, dan Bidang Perikanan Tangkap akan melakukan pendampingan kepada kelompok pengolah dan pemasar ikan di Kawasan TWP Gili Matra.
- Pihak yang akan dititipkan seluruh peralatan yang diberikan sampai diperiksa oleh pihak berwenang adalah perwakilan masing-masing kelompok, yaitu: 1) Kelompok pengolah dan pemasar ikan Putri Bahari akan menitipkan peralatan pengolahan abon ikan di rumah Ibu Rohanisa; 2) Kelompok pengolah dan pemasar ikan Lanter Gili akan menitipkan peralatan pengolahan bakso ikan di rumah Ibu Eka Suriyani; 3) Kelompok pengolah dan pemasar ikan Karya Bunda Meno akan menitipkan peralatan pengolahan kerupuk ikan di rumah Ibu Nurhaini.
- Pihak yang disebutkan di atas akan bertanggung jawab terhadap keamanan peralatan yang dititipkan dan bertanggung jawab terhadap kerusakan peralatan yang dititipkan selama menunggu barang diperiksa oleh pihak yang berwenang.
- Segala bentuk kegiatan penyerahan peralatan, penitipan peralatan, pemeriksaan peralatan oleh pihak yang berwenang, dan sebagainya harus diketahui dan disaksikan oleh perwakilan BKKPN Kupang Wilayah Kerja Gili Matra, Pemerintah Desa, Penyuluh Perikanan, dan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.

Setelah melakukan kesepakatan-kesepakatan di atas, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap perkembangan produksi olahan ikan yang telah dilakukan oleh kelompok pengolah dan pemasar ikan. Adapun hasil identifikasi yang dilakukan yaitu:

- Kelompok pengolah dan pemasar ikan Putri Bahari telah melakukan pembuatan abon ikan, telah memiliki label produk, dan telah menggunakan packaging yang layak. Namun kelompok Putri Bahari belum melakukan pembuatan pastel abon ikan sebagai produk lainnya yang disarankan berdasarkan hasil feasibility study. Label produk akan disesuaikan jika sudah mendapatkan PIRT. Sejauh ini belum ditemukan kendala teknis yang berarti dalam menghasilkan produk abon ikan.
- Kelompok pengolah dan pemasar ikan Lanter Gili telah melakukan pembuatan bakso ikan dan bakso goreng dengan beberapa varian rasa, telah memiliki label produk, dan telah menggunakan packaging yang layak. Namun kelompok Lanter Gili belum menggunakan kemasan vacuum untuk produk bakso ikan, sehingga produk bakso ikan memiliki waktu terbatas jika disimpan di suhu ruangan. Label produk akan disesuaikan jika sudah mendapatkan PIRT. Sejauh ini belum ditemukan kendala teknis yang berarti dalam menghasilkan produk bakso ikan.
- Kelompok pengolah dan pemasar ikan Karya Bunda Meno telah melakukan pembuatan kerupuk ikan, telah memiliki label produk, dan telah menggunakan packaging yang layak. Namun kelompok Karya Bunda Meno belum melakukan pembuatan kerupuk ikan dengan berbagai varian rasa sebagai produk lainnya yang disarankan berdasarkan hasil feasibility study. Label produk akan disesuaikan jika sudah mendapatkan PIRT. Sejauh ini belum ditemukan kendala teknis yang berarti dalam menghasilkan produk abon ikan.

Terkait dengan perkembangan pengajuan NIB, PIRT, dan sertifikat halal, informasi yang disampaikan ke kelompok pengolah dan pemasar ikan adalah:

- Seluruh kelompok telah memiliki NIB.
- Kelompok Putri Bahari dan Lanter Gili telah diajukan syarat administrasinya untuk PIRT, sedangkan kelompok Karya Bunda Meno belum diajukan syarat administrasinya untuk PIRT karena masih terkendala administrasi dari ketua kelompok.
- Seluruh kelompok sedang melengkapi formulir Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk sertifikasi halal.

**PAKET
KEGIATAN 6**
SUCOFINDO

a. Pelatihan Penangkapan Tuna dan cara penanganannya

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23-24 Mei 2022. Pelatihan ini dilakukan di laut selatan atau Samudra Hindia dengan dasar penentuan lokasi berdasarkan data hasil pergerakan tuna. Kegiatan ini diharapkan dapat Mendorong kegiatan peningkatan perikanan Tuna bagi nelayan Gili Balu melalui stimulant program bersama

Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara pelatihan penangkapan Tuna dan cara penanganan. Serta rencana bantuan alat tangkap perikanan yang memadai serta mendukung nelayan dalam peningkatan hasil tangkapan. Program ini bersinergi dengan program COREMAP-CTI dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi aktivitas perikanan Tuna dan alternatif perikanan.



Gambar 1.B.28. Pelatihan Penangkapan di laut Samudra Hindia

Ikan hasil tangkapan selama kegiatan pelatihan 2 hari berjumlah 3 (tiga ekor) yaitu ikan tengiri (7 kg), barakuda (8 kg), dan tuna sirip kuning (Yellow Fin Tuna) 87 kg (setelah dikeluarkan insang dan isi perut). Setelah dijual, ikan dibagikan kepada seluruh peserta sekaligus dilaksanakan diskusi bersama. Setelah kegiatan pelatihan selesai, pada malam harinya diadakan diskusi bersama dan evaluasi kegiatan pelatihan. Seluruh peserta dan beberapa nelayan lain yang bergabung

sangat antusias dan bersemangat untuk memulai kegiatan penangkapan ikan tuna. Beberapa perwakilan nelayan menitipkan pesan dan berharap agar dapat difasilitasi perahu penangkap tuna. Seluruh peserta pelatihan bersepakat bahwa ikan hasil tangkapan selama kegiatan praktik lapangan dijual dan hasilnya dibagikan kepada peserta. Harga ikan Tuna di Poto Tano berkisar Rp. 45.000/kg sedangkan di Labuhan Lombok Rp. 56.000 – 60.000/kg.

b. Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24-25 Mei 2022 dengan peserta seluruhnya merupakan perempuan, kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM Sumbawa Barat.

Kegiatan pelatihan diikuti oleh 9 POKLASHAR dan Kelompok JARI Kecamatan Poto Tano dengan jumlah peserta 50 orang antara lain:

Hari Pertama

- Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa Barat 1 Orang
- Bidang Pengolahan Pengolahan Produk dan Sumberdaya Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat 5 orang
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat 2 orang

- Penyuluh Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat 5 orang
- Kelompok POHLASHAR dan LSM JARI 36 orang

Hari Kedua

- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa Barat 5 Orang
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat 2 orang
- Penyuluh Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat 5 orang
- Kelompok POHLASHAR dan LSM JARI 36 orang

Hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan ini berupa pengenalan teknologi pengolahan ikan Cakalang/Tuna/Tongkol dan produk Surimi yang kemudian diolah menjadi makanan siap saji yaitu Bakso, Pempek dan Cendol Ikan serta, publikasi pada media social terkait produk yang telah dihasilkan.



Gambar 1.B.29. Pelatihan Hasil Perikanan oleh POKLAHSAR di kecamatan Poto Tano, Gili Balu

C. Pelatihan peningkatan kapasitas POKMASWAS

Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya di kawasan konservasi Gili Balu dan Pelatihan Pokmaswas dari Tim yang dibentuk oleh PT Sucofindo, sebagai pelaksana paket 6 COREMAP-CTI melakukan pelatihan selama tiga hari pada tanggal 23-25 Juni 2022 di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Pelatihan menggabungkan ceramah, presentasi, diskusi, kerja kelompok, dan bermain peran. Selain Diklat Pokmaswas. Peserta juga mempelajari dan melatih skill tentang cara membuat berita acara dari setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan, dan mempelajari pengetahuan dan keterampilan dasar tentang cara merekam kegiatan menggunakan logbook Pokmaswas, menganalisis data dan membuat laporan.

Peserta kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Pokmaswas di Kecamatan Pototanu Kabupaten Sumbawa Barat, mencakup 4 Pokmaswas yakni Pokmaswas Liangkuru Desa Senayan dusun Sepake; Pokmaswas Buah Lawa Desa Poto Tano; Pokmaswas Pasir Putih Desa Sagena; dan Pokmaswas Tanjungprapat Desa Kiantar. Secara keseluruhan jumlah peserta dari 4 Pokmaswas tersebut 49-50 orang.

Kelompok masyarakat pengawas yang merupakan komponen masyarakat yang berpotensi ikut secara aktif dalam pengawasan perikanan dapat terdiri dari unsur agama, unsur adat, nelayan, petani, pengusaha dibidang perikanan. Pokmaswas sebagai bagian dari masyarakat dan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang membantu pemerintah. Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3 M (Melihat/ Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan).

Pelatihan ini juga menyajikan sistem Marine Smart Patrol (SMART) Sebagai Sistem Informasi Pengelolaan Kawasan Konservasi, disampaikan oleh salah satu yayasan pemerhati lingkungan “Yayasan Sunda



Gambar 1.B.30. Pelatihan dalam ruangan

Kecil”. Sistem SMART merupakan alat untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan/ melaporkan hasil kegiatan lapangan di tingkat tapak. Selanjutnya diuraikan bahwa pelaporan menggunakan Sistem SMART. Kelebihan sistem pelaporan dalam sistem SMART:

- Bisa menghasilkan file laporan secara otomatis sesuai template yang disediakan.
- Proses meringkas data menjadi lebih cepat.
- Struktur laporan yang dihasilkan akan seragam sesuai dengan template yang disediakan.



Gambar 1.B.31. Praktik Lapang Sistem SMART

- Kemungkinan terjadi kesalahan dalam menyajikan data menjadi lebih kecil.
- Kemungkinan melakukan manipulasi data lebih terbatas sehingga data yang disajikan sesuai dengan data riil lapangan.

Setelah disampaikan materi Marine Smart Patrol (SMART) Sebagai Sistem Informasi Pengelolaan Kawasan Konservasi, praktek diruangan yang dimulai dengan download aplikasi smart pada HP peserta masing-masing kelompok Pokmaswas.

PAKET KEGIATAN 7
PT GEOHETRANDS

a. FGD Pengelolaan Perikanan Berbasis Individual Transferable Quota (ITQ) untuk Perikanan Tuna Longline yang Berbasis di Pelabuhan Benoa Bali

Telah dilaksanakan Focus Group Discussion dengan pemain kunci di sepanjang rantai pasok untuk tuna dan produk tuna. Kegiatan ini bergabung pada FGD Pengelolaan Perikanan Berbasis Individual Transferable Quota (ITQ) untuk Perikanan Tuna Longline yang

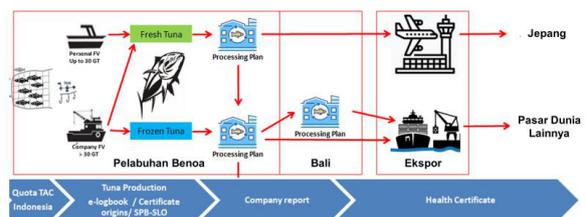
Berbasis di Pelabuhan Benoa Bali pada tanggal 20 April 2022 bertempat di Anvaya Beach Resort Bali. Paga kegiatan ini disampaikan perkembangan pendataan produksi tuna, baik dari ATLI, PPN Pengambengan, BKIPM dan Pangkalan PSDKP Benoa. Ditemukan masih adanya inkonsistensi data antar lembaga, baik itu dari BKIPM, ATLI, PPN Pengambengan maupun Pangkalan PSDKP Benoa.

Focuss Group Discussion ini adalah sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data hasil survei lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Dibutuhkan pendekatan alternatif pengelolaan termasuk pandangan Individual Transferable Quotas (ITQ) untuk perikanan tuna indonesia agar dapat dilaksanakan analisis lanjutan. Di FGD ini juga telah disampaikan data hasil survey dan wawancara serta analisis kelayakan usaha. Sebagian besar peserta menerima hasil tersebut walaupun ada sedikit catatan dan perubahan pada beberapa komponen biaya usaha penangkapan ikan tuna.

Selama bulan Mei dan Juni 2022, penyusunan laporan Analisis rantai pasok dan nilai produk tuna Indonesia di pasar global dari segmen industri perikanan tuna (rawai di Benoa) telah dilakukan.



Gambar 1.B.32. Pelaksanaan Diskusi pada FGD Pengelolaan Perikanan



Gambar 1.B.33. Skema Supply Chain (rantai pasok) ikan tuna pada pendaratan di Benoa – Bali.

b. Focus Group Discussion Konfirmasi Data dan Analisis Data Tuna Hasil Tangkapan Longline di Pelabuhan Benoa Bali

FGD dilaksanakan pada tanggal 13 April 2022 secara luring dan daring bertempat di Hotel Santika Bogor dan dihadiri oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, ICCTF, Koordinator Pemantauan Analisis dan Alokasi SDI, Koordinator kelompok Pemantauan dan Analisis Kepelabuhan Perikanan (Pengelola PIPP), Koordinator Kelompok Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas, dan para Tenaga Ahli dari Geohetrands.

Focus Group Discussion ini adalah sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data hasil survei lapangan yang telah dilakukan. Dibutuhkan set data time series dari PIPP,



Gambar 1.B.31. Praktik Lapang Sistem SMART

e-log book dan national report untuk melengkapi data dari hasil wawancara untuk disepakati agar dapat dilaksanakan analisis lanjutan. Sampai akhir Juni masih disiapkan data-data yang dibutuhkan untuk menjalankan model bioekonomi. Diharapkan bulan Juli sudah dapat diselesaikan draft laporan.

c. Koordinasi data ilmiah untuk penyusunan Harvest Strategy perikanan kakap merah dan kerapu di WPPNRI 573

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022 di Ruang Rapat RFMO, Gedung Mina Bahari 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Koordinator Kelompok Pengelola Perairan Pedalaman, Teritorial, dan Kepulauan serta Perairan Kelembagaan WPPNRI (Dr Fery Sutyan). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Sub-Koordinator dan Staf PSDI-KKP, LTPK, YKAN, Rekam Nusantara, dan tenaga ahli dari ICCTF GP7. Beberapa poin penting yang muncul dalam pertemuan tersebut adalah:

- Data statistik perikanan kakap dan kerapu sebelumnya masih ada di Pusdatin, namun Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap dapat menyediakan data time series yang dibutuhkan (10 tahun) terkait kakap dan kerapu dan memilih 5 spesies teratas dengan produksi terbesar
- ICCTF fokus pada ikan kakap yang memiliki produksi besar dan nilai pasar yang tinggi



Gambar 1.B.35. Koordinasi data ilmiah untuk penyusunan Harvest Strategy perikanan kakap merah dan kerapu di WPPNRI 573

- Rekam Nusantara telah melakukan analisis Spawning Potential Ratio (SPR) untuk data dari BRPL (Badan Riset Perikanan Laut) KKP, dan Catch per Unit Effort (CPUE) untuk data yang diberikan oleh YKAN dan FPI2KB Provinsi NTB. Analisis data menggunakan data yang tersedia dari tahun 2015 – 2020 (data untuk tahun 2021 masih sangat terbatas)
- Dari data time series tahun 2015 – 2021, jenis yang dominan untuk perikanan kakap adalah *Pristipomoides multidens*, *P. typus*, dan *Lutjanus malabaricus*, sedangkan untuk perikanan kerapu adalah *Epinephelus aerolatus*, *Variola albimarginata*, dan *Cephalopolis miniata*

- Berdasarkan analisis, nilai SPR dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan, meskipun masih di atas 30%
- Perlu memasukkan data tangkapan dari PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan) untuk meningkatkan analisis CPUE

Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, dilakukan diskusi analisis data awal penyusunan dokumen Harvest Strategy perikanan kakap dan kerapu di WPP 573. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2022 melalui tatap muka di Hotel Grand Savero Bogor dan melalui zoom meeting. Rapat dipimpin oleh Koordinator Kelompok Pengelola Sumber Daya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial, dan Kepulauan dan Kelembagaan Perairan Laut WPPNRI (Dr. Fery Sutyan) serta dihadiri oleh Sub Koordinator LPTPK PSDI dan Staf Kelompok, Sub Koordinator Data, perwakilan dari Direktorat Pelabuhan Perikanan, perwakilan dari Direktorat Pemasaran KKP, YKAN, Rekam Nusantara, dan ahli kakap ICCTF GP7. Beberapa poin penting yang muncul dalam pertemuan tersebut adalah:

- Dalam penyusunan dokumen HS Kakap dan Kerapu di WPPNRI 573 diperlukan data
- Data Ekspor Perikanan Kakap dan Kerapu di WPPNRI 573 tahun 2015-2021 dari Direktorat Pemasaran – DJPDSPKP dan Pusat karantina Ikan – BKIPM KP; Data Produksi Perikanan Kakap dan Kerapu per

spesies di WPPNRI 573 tahun 2011-2021 dari Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap – DJPT; Data PIPP Perikanan Kakap dan Kerapu di WPPNRI 573 tahun 2015-2021 dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan – DJPT; serta Data Biologis dari BRPL / Pusrisan

- Bagian Data Ditjen Perikanan Tangkap telah menyerahkan data produksi perikanan
- kakap dan kerapu tahun 2005 – 2020 untuk dianalisis lebih lanjut.
- Direktorat Pelabuhan Perikanan KKP juga telah menyampaikan data terkait PIPP.
- Direktorat PSDI telah menyiapkan draft awal untuk HS Kakap Kerapu di WPPNRI 573
- Perlu menyiapkan white paper untuk HS (dipimpin oleh ICCTF GP7).
- Disepakati bahwa tiga spesies kakap dan tiga spesies kerapu dipilih untuk diprioritaskan: *Pristipomoides multidentis*, *P. typus* dan *Lutjanus malabaricus* (untuk kakap), dan *Epinephelus aerolatus*, *Variola albimarginata*, dan *Cephalopis miniate* (untuk kerapu).
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi KKP untuk memfasilitasi identifikasi ikan kakap dan kerapu di lapangan, termasuk nama lokalnya.



Gambar 1.B.36. Pembahasan analisis data awal penyusunan dokumen Harvest Strategy perikanan kakap dan kerapu di WPP 573

- Dokumen HS ini juga harus memuat data dan informasi status stok dan kondisi pasar.
- Untuk data panjang tangkapan masih kurang untuk *P. typus*, sedangkan data untuk analisis SPR sudah cukup. Analisis untuk CPUE masih dalam proses.
- YKAN saat ini sedang dalam proses mendapatkan data BRPL (Badan Riset Perikanan Laut) yang lebih terstruktur untuk melengkapi data yang ada.

d. Inisiasi Strategi Pembangunan Kembali Stok dan Kaidah Pengendalian Penangkapan Perikanan Kakap dan Kerapu di Perairan Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022 secara daring dan luring bertempat di Hotel Aston Inn Mataram. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait isu dan permasalahan perikanan kakap serta melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam membangun program perbaikan perikanan (Fisheries Improvement Project/FIP) untuk perikanan kakap di Teluk Saleh. Beberapa rekomendasi tindak lanjut dari lokakarya tersebut adalah:

- Melakukan lokakarya finalisasi strategi pengelolaan untuk membangun kembali stok pada pertengahan Agustus 2022 dalam bentuk Harvest Control Rule (HCR) yang disepakati untuk didanai oleh ICCTF GP7

- Dokumen HS akan diusulkan untuk disahkan melalui Peraturan Menteri.

Telah tersusun draft 1 dokumen strategi panen (HS) perikanan kakap dan kerapu WPP 573, proses analisa data untuk SPR dan CPUE sudah mencapai kurang lebih 80%, dan White paper sedang disusun oleh tim teknis yang terdiri dari perwakilan KKP, YKAN, Rekam Nusantara, dan dipimpin oleh ICCTF GP7.



Gambar 1.B.37. Lokakarya inisiasi strategi membangun kembali stok kakap dan kerapu di Teluk Saleh

- Perlu diadakan beberapa pertemuan teknis untuk membahas kembali hasil analisis MERA dan melakukan penyesuaian jika diperlukan
- Diseminasi proses penyusunan dan hasil analisis strategi membangun kembali stok menggunakan MERA kepada Forum Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Teluk Saleh, sebelum lokakarya pada Agustus 2022.

e. Konsultasi publik Harvest Strategy (HS) untuk perikanan kakap merah dan kerapu di WPPNRI 713

Kegiatan konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 di Yogyakarta. Kegiatan ini dipimpin oleh Koordinator Kelompok Pengelola Sumber Daya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial, dan Kepulauan serta Lembaga WPP Perairan Laut (Dr. Fery Sutawan) bersama Sub Koordinator dan Staf Direktorat PSDI. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kepala Pusat Penelitian Perikanan BRSDMKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di WPP 713, Asosiasi Demersal Indonesia (ADI), mitra pendukung KKP (YKAN, SFP, REKAM, TLFF, ICCTF), dan pelaku usaha. Beberapa poin penting yang disepakati dalam konsultasi publik ini adalah:

- Penyusunan dokumen HS ini merupakan amanat dari Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Kakap dan Kerapu (Kepmen 123 Tahun 2021), sekaligus sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan Kerapu di WPP sehingga penurunan stok ikan dapat diantisipasi.
- Disepakati bahwa dokumen HS Kakap dan Kerapu di WPP 713 akan memprioritaskan

pengelolaan 3 (tiga) spesies kakap prioritas: *Lutjanus malabaricus*, *Pristipomoides multidens*, dan *Aphareus rutilans*; dan 4 (empat) jenis kerapu: *Epinephelus coioides*, *Epinephelus areolatus*, *Variola albimarginata*, dan *Plectropomus leopardus*.

- Pengelolaan perikanan kakap dan kerapu terdiri dari kontrol input, kontrol output, dan kontrol teknis
- Hasil analisis menunjukkan nilai SPR pada perikanan kakap masih >20% yang dapat dikategorikan dalam kondisi aman
- Berdasarkan hasil analisis, nilai SPR pada perikanan kerapu khususnya kerapu ekor putih dan kerapu sunu sudah
- Dokumen HS untuk ikan kakap dan kerapu perlu disempurnakan dengan informasi terkait pedoman penentuan waktu dan lokasi untuk penutupan lokasi penangkapan ikan kakap dan kerapu

Secara paralel, para ahli ikan kakap ICCTF GP7 telah mengumpulkan bahan dari dokumen HS dan menganalisis data sebagai dasar untuk menyusun white paper. Proses penyusunan dokumen white paper dimulai pada pertengahan Juni 2022 dan masih berlangsung.



Gambar 1.B.38. Konsultasi publik dokumen Harvest Strategy kepada para para pemangku kepentingan

f. Diskusi terkait kondisi, tantangan, dan hambatan komoditas rumput laut di tingkat industri pengolahan

Diskusi dilakukan dengan perusahaan pengumpul rumput laut dan pengolah rumput laut yang berlokasi di Surabaya dan sekitarnya. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT. Asia Mina Sejahtera di Surabaya, PT. Hakiki Danuarta di Pandaan, dan PT. Kappa Carrageenan Nusantara di Pasuruan. Adapun capaian kegiatan yang telah terlaksana adalah sebagai berikut:

- Data primer dari ketiga responden telah diperoleh dan setelah melakukan analisis hasil rekomendasi untuk peningkatan industry rumput laut akan dilakukan validasi kembali kepada para responden.
- Hasil dari kegiatan ini juga telah terpetakan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh para industry ditengah tingginya harga dasar rumput laut di tingkat petani, keterbatasan jalur rantai pasok, tingginya biaya logistic dan naik-turunnya demand yang terjadi di wilayah Eropa dan China.

Untuk mendapatkan arahan juga langkah penguatan industri rumput laut nasional yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) maka dilakukan FGD pada tanggal 27 Mei 2022. Adapun hasil dari FGD ini adalah rumput laut telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas prioritas perikanan nasional yang dapat sebagai prime mover masyarakat pesisir yang miskin. Selain itu, komoditas rumput laut memberikan multiple effect dan manfaat pada stakeholders di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, KKP sudah melakukan beberapa program terobosan seperti penelitian pengembangan bibit unggul, inovasi teknologi pengolahan produk rumput laut menjadi produk setengah jadi dan serta penguatan pada daya saing global.



Gambar 1.B.39. Pertemuan dengan perwakilan Industri Pengolahan Rumput Laut

g. Pemetaan area dan tutupan lahan rumput laut menggunakan citra satelit

Pemetaan area dan tutupan lahan rumput laut akan menggunakan citra satelit dari google earth. Kegiatan ground truthing kan dilakukan di setiap lokasi budidaya rumput laut untuk menentukan titik koordinat dengan menggunakan Global Positioning System (GPS). Semua informasi dari lapangan akan dianalisis menggunakan sistem informasi geografi menggunakan software ArcGIS untuk membuat peta tematik. Pada periode ini telah



Gambar 1.B.39. Pertemuan dengan perwakilan Industri Pengolahan Rumput Laut

dilakukan survei untuk melakukan ground truthing di desa-desa penghasil rumput laut yang tersebar di beberapa wilayah di NTB antara lain, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa dan Dompu. Pelaksanaan survei dilakukan setelah mendapatkan informasi sekunder dan laporan mengenai sebaran rumput laut. Kegiatan ground truthing dilakukan mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 26 Juni 2022 yang mencakup:

Kabupaten Lombok Timur

- Batunampar
- Jerowaru
- Seriwe
- Teluk Ekas

Kabupaten Lombok Tengah

- Teluk Bumbang
- Gerupuk

Kabupaten Sumbawa

- Tanjung Belle
- Moyo Hilir
- Labuhan Badas

Kabupaten Dompu

- Kwangko
- Manggelewa
- Nanga Tumpu
- Kempo

Kegiatan survei pemetaan rumput laut ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai sebaran budi daya rumput laut dan melakukan analisis tutupan area dan luasan budi daya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Master Degree Program

Pada tanggal 3 Juni 2022 dilaksanakan pertemuan pembahasan rencana kegiatan lanjutan *master degree program* di Hotel Grand Savero, Bogor. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Perlu pemanfaatan dana sisa. Pandemi menyebabkan banyak dana tidak terserap karena dana untuk mahasiswa di Australia tidak terpakai
- Konsep timeline rencana kegiatan:
 1. Ujian Akhir Mahasiswa
 2. 10-15 Juli Monitoring dan evaluasi untuk mendiskusikan dengan mahasiswa dan pihak kampus terkait performance mahasiswa, kenyamanan di Australia, service dari universitas, dilakukan kunjungan ke Australia
 3. 12 Juli: Wisuda Mahasiswa
 4. Setelah 17 Agustus: Diseminasi hasil studi mahasiswa, dilakukan di Indonesia
 5. Awal September: Studi banding
- Monev dilaksanakan untuk melihat dampak dari hasil studi untuk IPB dan negara (*multiplier effect*)



Gambar 1.B.41. Diskusi program master degree bersama IPB

C. BLENDED FINANCE



1. Rapat dengan ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 2022. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan terkait kelanjutan dan kegiatan dari consultant team ADB nasional. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- ICCTF ingin mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh konsultan, yaitu Bu Poppy dan Pak Dadang.
- Consultant team diharapkan dapat melaporkan secara berkala dan rutin.
- Pada akhir juni akan ada pelaporan terkait kelanjutan hasil dari ADB Consultant Team.
- Pak Ghislain akan memberikan beberapa masukan terkait kegiatan dari ADB Consultant Team sebagai pengingat.
- Bu Poppy diharapkan dapat berdiskusi terhadap Bu Vivi dari Bappenas.

Pertemuan dengan ADB dilanjutkan pada tanggal 4 April 2022. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan penyesuaian tugas consultant team ADB nasional serta pemaparan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan project. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

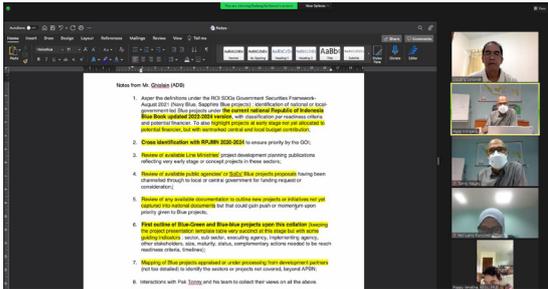
- Akan dilaksanakan *kickoff meeting* dengan *stakeholder* terkait pemberitahuan akan keperluan dokumen untuk mendukung project.
- Pak Dadang akan membuat draft ToR dan paparan pembuka Bu Yanti untuk *kickoff meeting*

Diskusi dengan ADB dilanjutkan pada tanggal 6 Juni 2022 bertempat di Hotel Mandarin, Jakarta. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan pengembangan blue finance. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:



Gambar 1.C.1. Diskusi Blue Finance dengan ADB

- Presiden telah mengeluarkan instruksi terkait blue ekonomi (SDGs)
- Langkah selanjutnya adalah bagaimana bekerja dengan Kemenkeu. Selain itu juga wujud yang konkrit terkait bagaimana strategi, konteks, dll. Intinya adalah isu terkait blue ekonomi saat ini apa saja
- Blue ekonomi dapat meningkatkan livelihoods, dan juga meningkatkan sustainable SDA.
- Perspektif terkait dengan Blue dan SDG sangat penting. Oleh karena itu, persamaan pemahaman atau persepsi terkait hal tersebut perlu dilakukan
- Pembiayaan melalui green sukuk dapat mewujudkan capaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan
- Perencanaan pembiayaan akan didiskusikan lebih lanjut dengan Bappenas

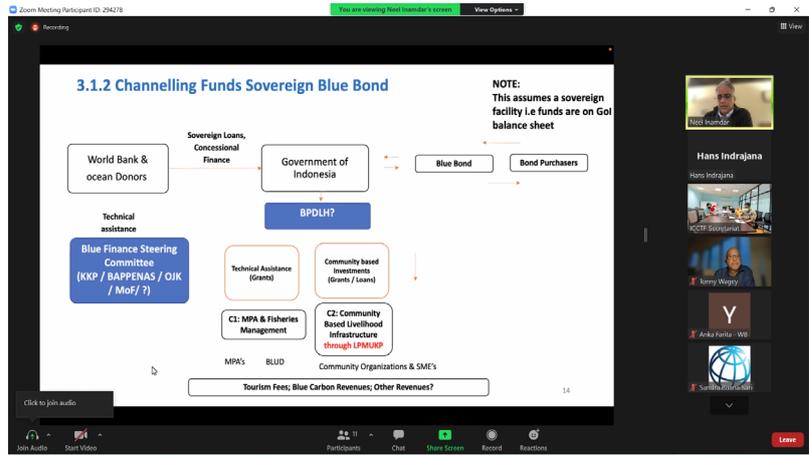


Gambar 1.C.2. Diskusi lanjutan Blue Finance dengan ADB

2. LAUTRA Komponen 3.1

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2022. Agenda pertemuan ini adalah membahas progress dari *blue finance initiative*. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Pembahasan *blue bond* akan diadakan *meeting* dengan Kemenku untuk membahas kelanjutan dari *blue bond* itu sendiri.



Gambar 1.C.3. Pembahasan framework blue bond

- Pembahasan *advisory committee* akan dilakukan dengan *stakeholder* untuk memperoleh masukan yang sesuai
- *Feedback* untuk *policy notes* dikirimkan oleh Neel paling lambat 22 April 2022
- Surat Keputusan *Advisory Committee* selesai pada akhir April
- Tim dari Bappenas melakukan review dan memberikan masukan terkait desain LAUTRA Blue Finance komponen 3.1
- Tim dari Bappenas melakukan meeting dengan Kementerian Keuangan selama bulan Ramadhan
- Tim dari World Bank menyiapkan draft ToR untuk *Blue Finance Policy Note Workshop*

Pertemuan terkait LAUTRA Komponen 3 dilanjutkan dengan pembahasan teknis Blue Finance pada tanggal 14 April 2022. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Pelaksanaan komponen 3 harus disesuaikan dengan hasil komponen 1 dan komponen 2
- *Blue bond* yang diajukan oleh Neel, setelah arahan dari Sesmen Bappenas diarahkan untuk diganti menjadi *blue sukuk* untuk mempermudah dalam pengaturan dana tersebut.
- Akan dilakukan diskusi yang dilaksanakan untuk pembahasan Komponen 1 dan Komponen 2 (DJPRL)
- Akan dilaksanakan kajian terkait implementasi sarana pembiayaan lainnya
- Diperlukannya penentuan lokasi untuk *piloting project*

3. Mission INSAN TERANG LAUTRA

Pertemuan ini dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 31 Mei 2022-6 Juni 2022. ICCTF menghadiri undangan kegiatan pada hari ke 1-3 secara *online*, dan hari ke-4 secara *offline*. Agenda yang dibahas adalah persiapan untuk proyek LAUTRA. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

Hari Pertama (31 Mei 2022)

- Dalam persiapan perlu dipikirkan exit strategynya karena terkait dengan keberlanjutan program
- Hal yang ingin diketahui lebih jauh oleh World Bank:
 1. Ecosystem degradation rates
 2. Variation in ecosystem service value
 3. Fisheries value of seagrass
 4. MPA management cost
 5. Use beyond WB project appraisal
- Dukungan terkait project Lautra sangat dibutuhkan. Kelembagaan WPP yang ada saat ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam Penangkapan Ikan Terukur
- Terkait dengan Desa Lautra ada beberapa point yang telah dijelaskan, di dalamnya terdapat beberapa tematik yang sudah didiskusikan termasuk ke dalam pemilihan lokasi
- LPMUKP akan menjadi *beneficiaries* untuk project ini
- Kebutuhan dari masing-masing akan ada perbedaan tetapi untuk mekanisme pemantauan secara garis besar akan sama

Hari Kedua (2 Mei 2022)

- Kawasan konservasi yang sudah termasuk kedalam UPTD adalah kawasan konservasi yang hendak

dijadikan BLUD. Kalau kawasan belum termasuk kedalam UPTD baru akan dijadikan BLUD. Diperlukan supporting operational dalam pembentukan UPTD

- Adanya beberapa hal dari blue carbon yang dapat diperhatikan, seperti science terkait jumlah blue carbon di satu daerah. Selain itu topik terkait blue finance, bagaimana blue carbon dapat menjadi resource funding, karena blue carbon secara langsung belum bisa menjadi dana, jika mau dijadikan dana perlu ada beberapa kegiatan dalam proses yang sesuai dengan validasi yang menyesuaikan dengan standart nasional
- Mengenai scope BLUD atau BLU yang akan dilaksanakan akan sejalan dengan bagian Blue Finance yang tercantum. Jika inline dapat dipertimbangkan dengan BPLDH. Sehingga dapat didiskusikan dengan Kementerian Keuangan dan KKP. Untuk keterkaitan komponen 1 dapat bersinergi dengan blue finance
- Bappenas dapat menjembatani penggunaan dan distribusi dana BPLDH kepada masyarakat
- KKP akan melakukan review kembali untuk target MPA yang akan ditujukan
- Terkait dengan LPMUKP akan didiskusikan secara detail, kita akan memanfaatkan potensi LPMUKP yang ada di project ini.

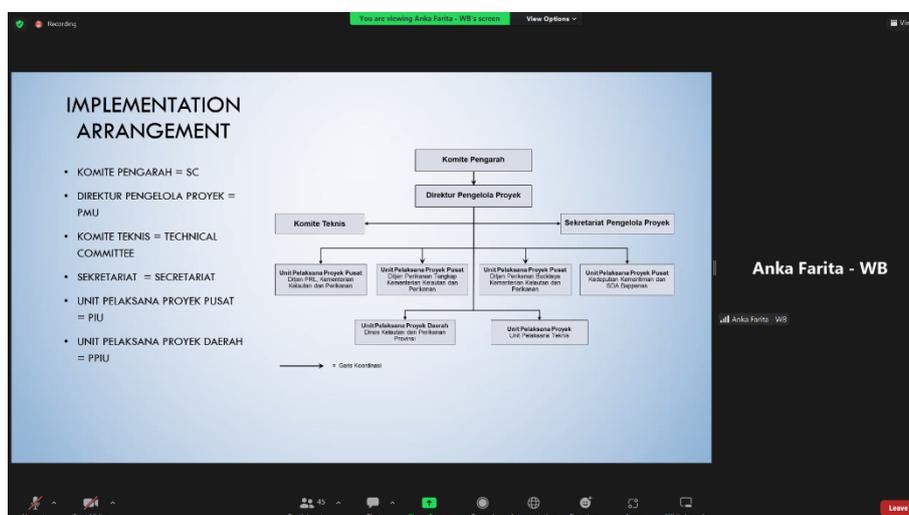
Hari Ketiga (3 Mei 2022)

- Komponen 2 merupakan komponen yang berhubungan dengan livelihood. Tujuannya untuk mengembangkan perekonomian yang ada di desa-desa. Sehingga memiliki perekonomian berkelanjutan

- Kampung Nelayan bertujuan untuk mengembangkan kampung-kampung yang ada di MPA dan meningkatkan infrastruktur di kampung tersebut. LPMUKP akan membantu dalam pengaliran dana
- Terkait dengan Desa Wisata Bahari akan didasari dengan kebutuhan dari desa tersebut, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya
- Perlu adanya tools yang dapat mereview hasil pekerjaan yang telah dilakukan sehingga dapat diketahui tepat atau tidak
- Diperlukan informasi terkait infrastruktur dan operational cost yang sudah ada dan dapat dihubungkan dengan blue financing mechanism
- Diperlukannya informasi terkait baseline data dari desa yang ingin dilaksanakan
- Di dalam komponen 1 adanya beberapa aspek yang berhubungan dengan komponen 3 seperti feasibility study, including MPAs gap and return potential analysis. Adanya pengaruh dengan BLU yang terpengaruh dengan lingkungan. Gap yang ada di MPA diperlukan untuk mengetahui informasi yang ada dan berhubungan langsung dengan jumlah pendanaan yang diperlukan
- Terkait RC dan PAD sudah sepakat akan kelanjutannya
- Terkait dengan Advisory Committee, WB sudah memberikan bantuan untuk pembentukannya. Advisory Committee ini akan menjadi legacy untuk LAUTRA
- Trust fund yang ada di Indonesia, dibagi menjadi 2, public dan private. MPA diarahkan menjadi BLUD karena BLUD adalah Lembaga pengelola keuangan. Sehingga BLUD adalah lembaga keuangan yang fleksibel, pada akhirnya pengelolaan MPA dapat dibiayai secara langsung.

Hari Keempat (6 Mei 2022)

- Saat ini yang ditujukan dari komponen 3 adalah untuk membentuk instrument yang akan mendanai project yang berhubungan dengan pengelolaan berkelanjutan pada project ini
- Dana diperoleh dari Problue sebesar 5 Juta USD
- Kapasitas diperlukan dalam bagian financing, dikarenakan pengelolaan funding
- Diharapkan ICCTF/Bappenas dapat lebih agresive dan lebih aktif



Gambar 1.C.4. Pemaparan oleh World Bank

4. Blue Finance Stakeholder Workshop

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2022 di Hotel Fairmont, Jakarta. Tujuan pertemuan adalah untuk mendapatkan input pada dokumen policy notes. Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, dimana disebutkan bahwa APBN hanya dapat mendanai sekitar 20-25% dari 7 Agenda RPJMN 2020-2024 sehingga diperlukan inovasi pendanaan, salah satunya melalui Blue Finance. Direktur Eksekutif ICCTF juga menambahkan informasi estimasi dari UNDP dimana dibutuhkan investasi USD 8-9 Miliar untuk sektor kelautan dan perikanan Indonesia untuk dapat menuju visi Indonesia 2045.

Konsultan World Bank yaitu Neel Inamdar menyebutkan bahwa Indonesia merupakan pendanaan berkelanjutan selama 10 tahun terakhir dan menjadi impact investment market terbesar di ASEAN. Tantangan dan langkah dalam mewujudkan Blue Finance di Indonesia adalah koordinasi blue framework nasional sebagai bagian SDG Govt. Securities Framework dan OJK Blue Finance Taxonomy, koordinasi blue tagging, pengembangan MRV Framework, Awareness engagement, intervensi kebijakan, dan koordinasi yang dapat mendorong pihak-pihak lain spt perusahaan, NGO, dll. Tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:



Gambar 1.C.5. Diskusi Pemangku Kepentingan dalam Blue Finance

- Perlu total kebutuhan pasti yang dibutuhkan oleh issue *Blue* dan akan diintegrasikan dengan issue *climate change*
- Perlu stimulus awal untuk mendapatkan dukungan, policy notes dapat menjadi “peta” kondisi yang ada saat ini
- Perlu adanya tahapan dan kesiapan proyek/ sektor yang akan dilaksanakan
- Perlunya *lesson learned* dari negara lain untuk mengembangkannya di Indonesia. Contoh terbaiknya adalah Seychelles. Negara ini sangat jelas dari awal dalam mendefinisikan apa yang ingin mereka lakukan dengan Blue Economy
- Perlunya roadmap sehingga dapat memfokuskan tujuan dan *awareness*, serta resiko-resiko yang dapat dipaparkan

5. Blue Finance Debriefing Call

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022 melalui aplikasi Zoom. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

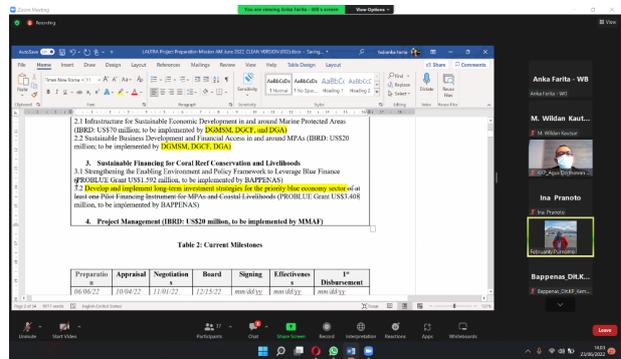
- ADB akan mengikuti arahan dari team Bappenas/ICCTF untuk pengembangan blue finance

- Akan diadakan seminar sebelum dilaksanakannya blue finance national workshop untuk pembahasan yang akan dilakukan
- Framework acuan akan menggunakan SDG framework yang akan lebih dikembangkan agar dapat menghasilkan SDG blue bond

6. Undangan Pre Wrap Up INSAN TERANG LAUTRA dengan World Bank

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022 melalui aplikasi Zoom. Agendanya adalah pembahasan draft dokumen *aide memoire*. Hasil dari pertemuan ini untuk bagian Component 3 – Blue Finance, antara lain sebagai berikut:

- **Sub-component 3.1.** Strengthening the Enabling Environment and Policy Framework to Leverage Blue Finance (PROBLUE grant US\$ 1.592 million, to be implemented by BAPPENAS)
- **Sub-component 3.2.** Develop and implement long term investment strategies for the priority blue economy sector (PROBLUE Grant US\$ 3.408 million, to be implemented by BAPPENAS)
- Pak Roby meminta agar kata tiga pada kalimat “three potential investment” dihapus karena jumlah strategi ke depan masih bisa berkembang.



Gambar 1.C.6. Pembahasan aide memoire

- Pada matrix: Role of LPMUKP dihapus, kata “location” pada potential pilot project dihapus, dan peerubahan kalimat menjadi “Function, roles and composition of blue finance advisory committee”
- Kegiatan engagement sudah dilakukan pada tanggal 13 Juni 2022 lalu di Hotel borobudur
- Selain tentang komponen 3 diatas, diperlukan diskusi lebih lanjut mengenai peran dari BLU-LPMUKP

D. BLUE CARBON

1. Meeting Workshop Blue Carbon dalam Pembangunan Blue Economy dan Pencapaian Target NDC

Pada tanggal 18 April 2022, ICCTF menghadiri undangan kegiatan Workshop Blue Carbon dalam Pembangunan Blue Economy dan Pencapaian Target NDC. Tujuan dari pertemuan ini adalah mengidentifikasi kebijakan prioritas dan kebutuhan dukungan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pengembangan blue carbon di Indonesia, merumuskan butir-butir pokok yang diperlukan dalam rangka penyusunan strategi pengembangan blue carbon untuk mendukung pembangunan blue economy dan pencapaian target NDC Indonesia, serta merumuskan operasionalisasi konsep blue carbon untuk pengelolaan jasa ekosistem pesisir laut yang berkelanjutan. Workshop ini adalah pertemuan yang pertama dari rencana 3 rangkaian workshop. Poin-poin penting hasil dari workshop ini antara lain sebagai berikut:

- Indonesia berperan penting di dunia bahkan sebagai leading dalam pembahasan Ocean and Climate. Agenda mitigasi kelautan dan pesisir menjadi langkah penting. Diharapkan agenda emisi tidak hanya terhenti di tahun 2030 saja tapi hingga tahun 2050 dengan dukungan semua pihak. Potensi pesisir dan laut sangat besar, maka hal yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan potensi tersebut.
- Beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan hutan yakni penguatan pengelolaan hutan lestari dengan pendekatan Landscape Management dan penguatan implementasi melalui multi-usaha kehutanan, penguatan



Gambar 1.D.1. Diskusi blue carbon dalam pembangunan blue economy di Indonesia

- implementasi akses legal dan penguatan tata kelola aspek lingkungan sosial ekonomi. Tentunya implementasi ini membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam penguatan pengelolaan hutan lestari.
- Strategi dan implementasi pengelolaan ekosistem blue carbon melalui konservasi perairan meliputi perluasan kawasan konservasi, peningkatan dan efektivitas kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan potensi mitigasi perubahan iklim sektor kelautan dan perikanan.
- Perlunya meningkatkan kolaborasi para pihak dalam penguatan IPTEK Blue Carbon dalam mendukung capaian NDC dan pengembangan sistem Blue Economy.
- Blue carbon juga diharapkan dapat menjadi pijakan baru yang tidak hanya berbicara dimensi ekologis semata, namun juga dapat menyentuh dimensi manfaat sosial ekonomi masyarakat.

2. Rapat dengan DISER

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022 untuk membahas tindak lanjut kerjasama Bappenas-ICCTF dengan DISER dalam bidang blue carbon. Berikut adalah hasil pembahasan dari pertemuan ini:

- Pelatihan Oktober 2022: technical training -> audiens: tahu lebih banyak tentang karbon biru/bekerja di bidang ini membangun keterampilan mereka
- Policy training (8 modul) -> audiens: orang-orang baru yang tahu sedikit/baru tentang karbon biru -> 3 hari -> Disarankan offline
- Pejabat pemerintah pusat yang akan menerima pelatihan -> TBC
- Secara bersamaan dalam 2 minggu



Gambar 1.D.2. Diskusi dengan DISER

- Pelatihan akan dilakukan dalam Bahasa Indonesia untuk tingkat sub-nasional dan Bahasa Inggris untuk tingkat nasional.
- ICCTF akan menerjemahkan materi untuk pelatihan sub-nasional

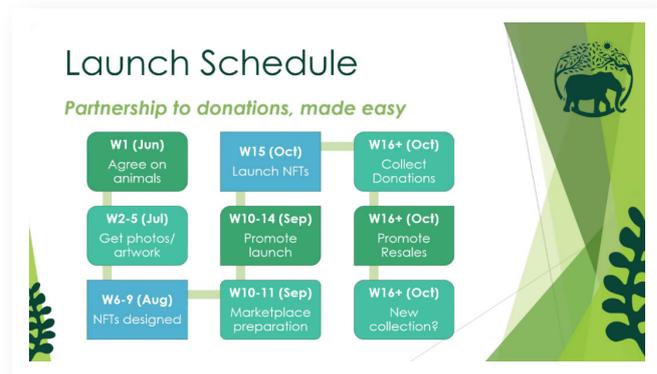
2

Program Strategis dan Penggalangan Dana (*fundraising*)

2.1 Rapat NFT dengan ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022 sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini dijelaskan bagaimana NFT dapat menjadi alternatif untuk mendapatkan pendanaan. Hasil dari pertemuan ini sebagai berikut:

- Jadwal yang diusulkan bersifat tentatif
- Perlu dibuat kesepakatan mengenai persentasi profit
- Perlu diskusi tindak lanjut mengenai administrasi



Gambar 2.1. Usulan jadwal kerjasama

2.2 Pembahasan Penyusunan Usulan Daftar Rencana Kegiatan Hibah Towards Sustainable and Conversion – Free Aquaculture in Indonesia Seas Large Marine Ecosystem (ISLME)

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022 di Hotel Hermitage, Jakarta dengan agenda pembahasan penyusunan usulan daftar rencana kegiatan Hibah. Dari pertemuan ini kemudian dihasilkan Dokumen DUK mengikuti format dari Bappenas. Ada pun beberapa poin penting pada pertemuan ini antara lain:

- Penyusunan DRKH tahun 2022: dasar hukum yakni permen PPN/Bappenas No. 4/2011 tentang tata cara perencanaan pengajuan usulan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan hibah
- Jenis dan bentuk hibah terdiri dari hibah yang direncanakandan hibah langsung. Sedangkan bentuk hibah terdiri dari uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa, dan surat berharga
- Proyek budidaya pakan udang merupakan jenis hibah yang terencanakan
- Pengussulan kegiatan hibah yang direncanakan tahapannya: kementerian/ lembaga □ kementerian dan lembaga (ditanda tangani Menteri) □ disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Terdapat beberapa persyaratan pengusulan kegiatan: mencakup persyaratan umum, daftar isian pengusulan dan dokumen usulan kegiatan hibah
- Jangka waktu penyusunan DRKH tahun 2022: surat bappenas kepada K/L/Pemda/ BUMN dilakukan pada tanggal 11 mei 2022, rapat koordinasi pengusulan kegiatan 13 mei 2022, batas waktu penyampaian SUK dan DPIK dialkukan 15 juni 2022, dan penilaian kesiapan di Kem PPN/Bappenas

minggu III dan IV serta finalisasi DRKH 2022 (penetapan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas) dilakukan minggu I-II Juli 2022

Selanjutnya dilakukan pertemuan lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2022, dengan agenda diskusi perubahan estimasi budget. Ada pun beberapa poin penting pada pertemuan ini antara lain:

- Diskusi dilakukan dengan mereview budget indikatif yang telah disusun.

- Budget indikatif telah dilakukan revisi dengan menambahkan komponen project preparation (PPG) USD 82.569, Mid-Term and terminal evaluation (USD 30.000) dan Project management cost (PMC) USD 126.000
- Dokumen DUK yang telah direvisi akan disesuaikan dengan format yang telah ada

3 | Komunikasi, *Outreach* dan Kemitraan

Berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi yang terkait dengan penanggulangan perubahan iklim bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak perubahan iklim, sekaligus mensosialisasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Bappenas pada satker ICCTF dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas. Pada tahun 2021 hingga di tahun 2022 ini, kegiatan komunikasi dan publikasi ICCTF juga diarahkan untuk mendukung implementasi Bappenas dalam konteks RPJMN serta monitoring ekosistem pesisir prioritas dan Rehabilitasi Terumbu Karang.

Kegiatan komunikasi ICCTF terbagi atas dua strategi yaitu komunikasi internal dan eksternal. Melalui kegiatan-kegiatan komunikasi ini, eksistensi ICCTF sebagai satu-satunya lembaga perwalian dana perubahan iklim yang dimandatkan oleh pemerintah di Indonesia diharapkan dapat lebih dikenal dan diakui, baik oleh pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri. Komunikasi internal kepada seluruh staf ICCTF di semua level untuk meningkatkan manajemen pengetahuan seluruh staf tentang

visi-misi ICCTF, menginternalisasi nilai-nilai strategis organisasi, dan membangun solidaritas staf agar terbangun suatu budaya kerja positif di ICCTF.

Sedangkan untuk kegiatan komunikasi eksternal, ICCTF menekankan pada pengenalan visi-misi organisasi, peranan strategis organisasi, serta eksistensi dan fungsi dari pengembangan program - program ICCTF. Selain itu juga menyebarluaskan capaian serta pembelajaran program-program ICCTF yang layak untuk disebarluaskan dan direplikasi di daerah lainnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan serupa. Upaya pengenalan dan penjangkauan publik ICCTF dilakukan secara intens dengan pola yang beragam dan target yang variatif. Pola komunikasi yang diterapkan secara umum tidak hanya dalam bentuk sosialisasi dan ekspose program - program ICCTF, tetapi juga dalam bentuk kunjungan ke lokasi program, pameran dan seminar, optimalisasi sosial media dan website ICCTF, serta peningkatan relasi dengan media melalui kegiatan press conference. Komunikasi lebih fokus pada komunikasi eksternal melalui penyelenggaraan kegiatan kick-off, seminar publik, serta pelatihan dan juga Exit Strategy.

3.1 Media Sosial

Pada triwulan kedua 2022 ini, ICCTF melakukan strategi pendekatan komunikasi digital karena dinilai lebih interaktif dan real time, melalui pengelolaan media sosial ICCTF yang terdiri atas Facebook (<https://www.facebook.com/IndonesiaClimateChangeTrustFund>); Twitter (@ICCTF_ID); Instagram (@icctfofficial); Youtube (ICCTF Official) dan website ICCTF (<https://www.icctf.or.id/>). ICCTF berupaya untuk selalu mengoptimalkan kanal informasi yang tersedia

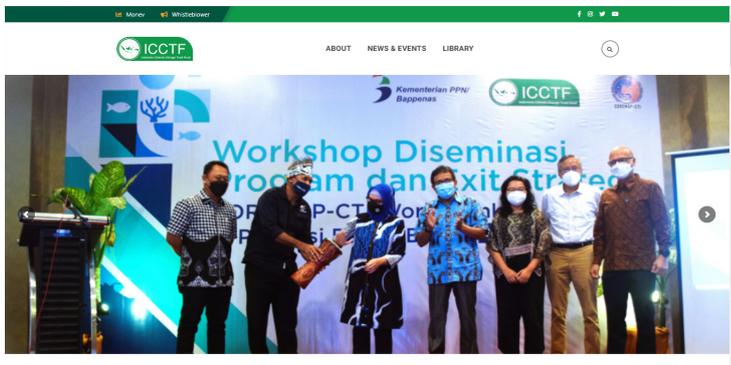
termasuk media sosial dengan memperbaharui penyebaran konten informasi dan foto - foto kegiatan terkini yang dilakukan oleh ICCTF dan para mitra pelaksana di daerah. Portofolio pengelolaan media sosial ICCTF pada periode triwulan pertama terangkum pada Gambar dan Tabel di bawah. Adapun laporan *organic traffic* dari media sosial yang dikelola oleh ICCTF terangkum dalam infografis berikut.

JUMLAH PENGIKUT

Sampai dengan JUNI 2022



Gambar 3.1.1 Infografis Perkembangan Akun Sosial Media ICCTF: Facebook, Twitter dan Instagram pada kuartal 2 (Hingga Akhir bulan Juni) Tahun 2022.



Gambar 3.1.2 Homepage Website ICCTF “Workshop Diseminasi Program dan Exit Strategy COREMAP-CTI World Bank di Sorong Papua Barat” pada Kuartal 2 (Bulan April) 2022.



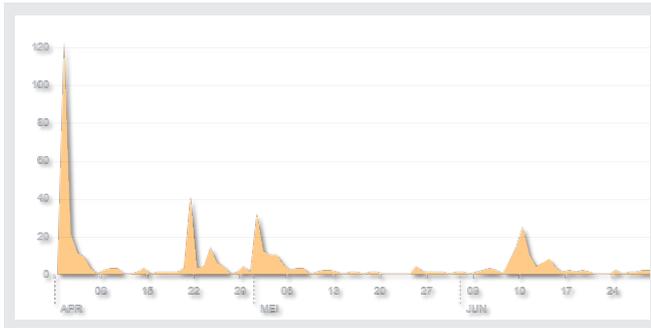
Gambar 3.1.3 Homepage Website ICCTF “Closing Project COREMAP-CTI World Bank di Jakarta” pada Kuartal 2 (Bulan Mei) 2022.



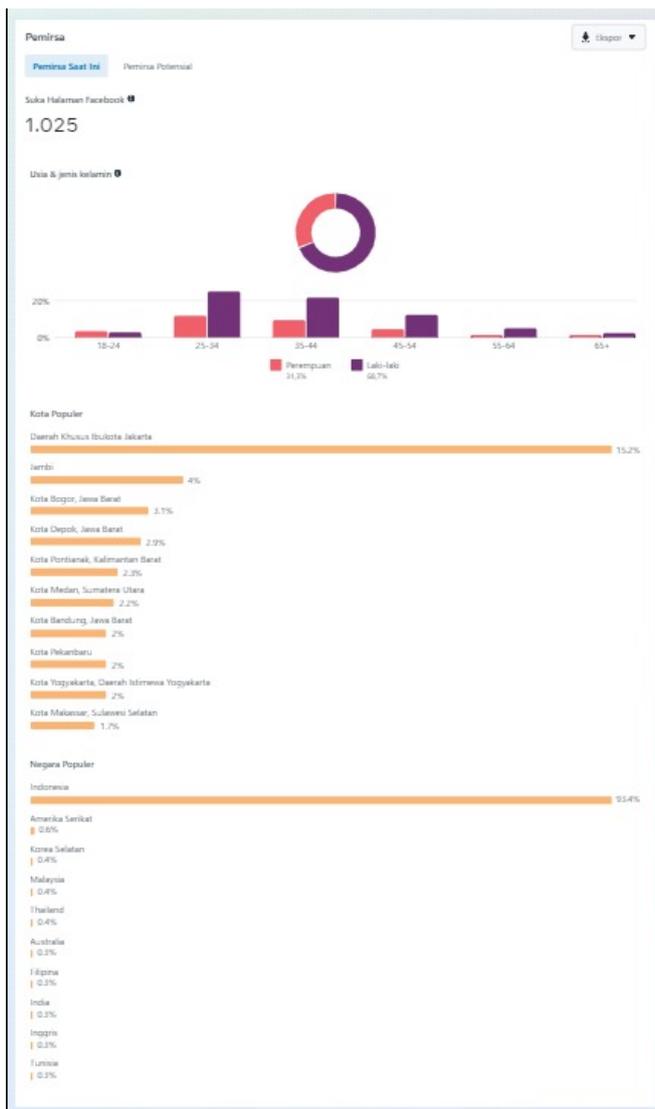
Gambar 3.1.4 Pop-up Website ICCTF pada Kuartal 2 (Bulan Juni) Tahun 2022.



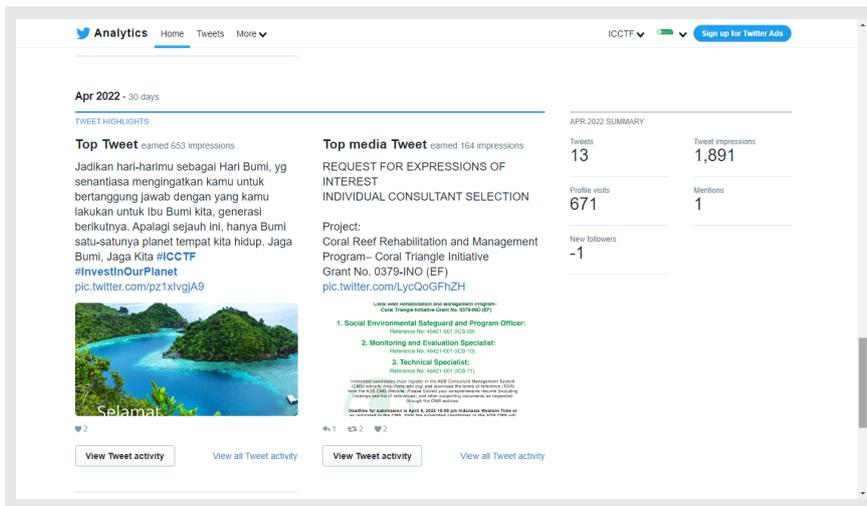
Gambar 3.1.5 Hasil Jangkauan Visit & Visitor Website ICCTF kuartal 2 (Bulan April, Mei dan Juni) Tahun 2022.



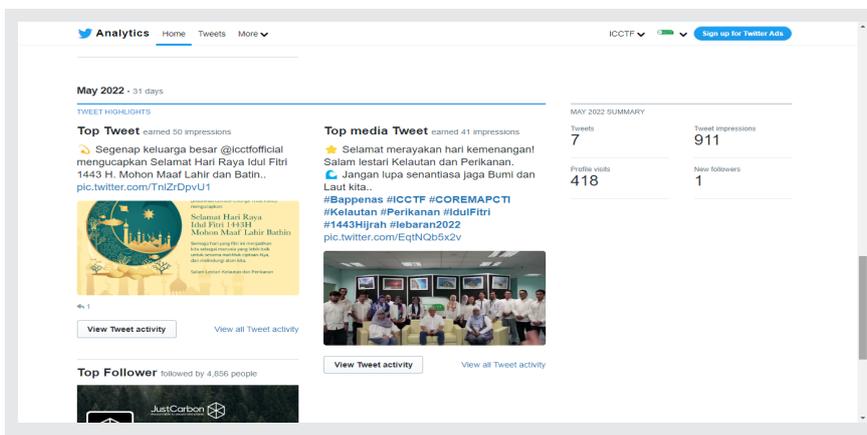
Gambar 3.1.5 Hasil Jangkauan Visit & Visitor Website ICCTF kuartal 2 (Bulan April, Mei dan Juni) Tahun 2022.



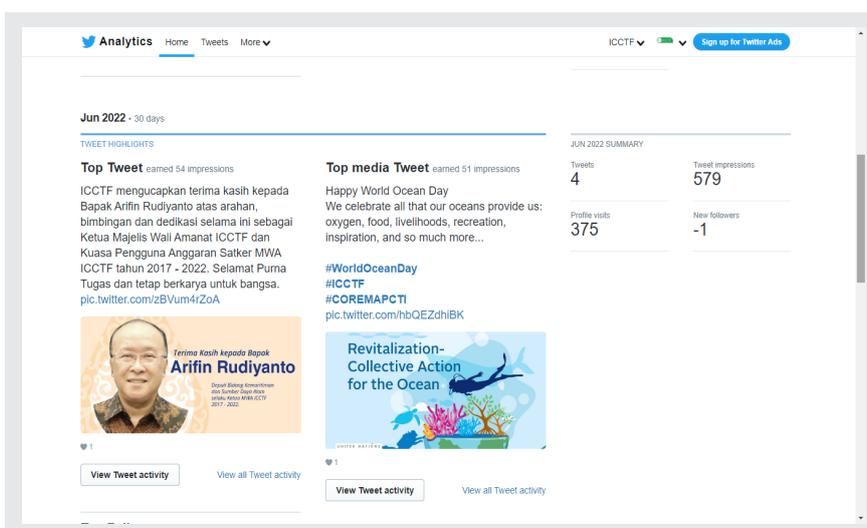
Gambar 3.1.7 Hasil Jangkauan Pemirsa Suka Halaman Facebook Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada kuartal 2 (Bulan April, Mei dan Juni) Tahun 2022.



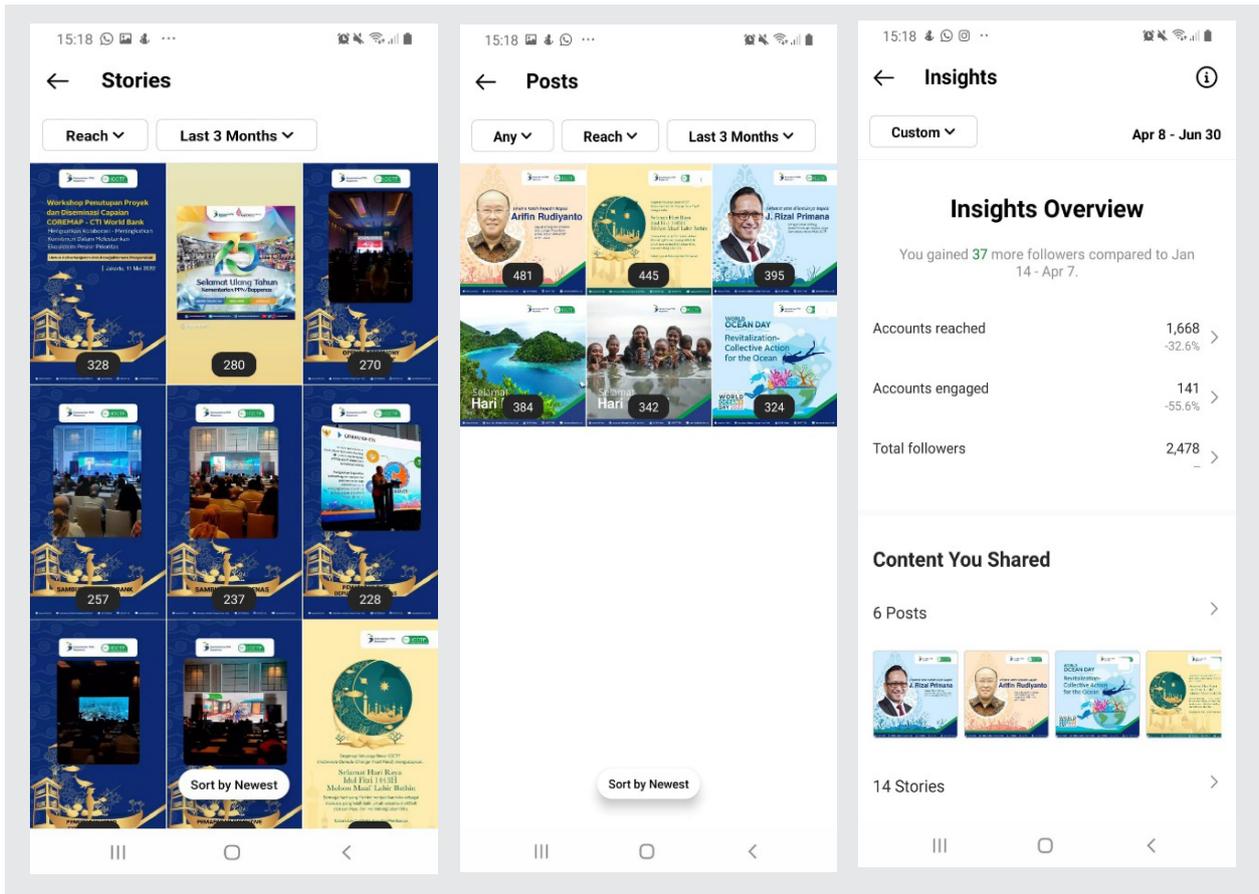
Gambar 3.1.8 Hasil Jangkauan Twitter Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 2 (Bulan April) Tahun 2022.



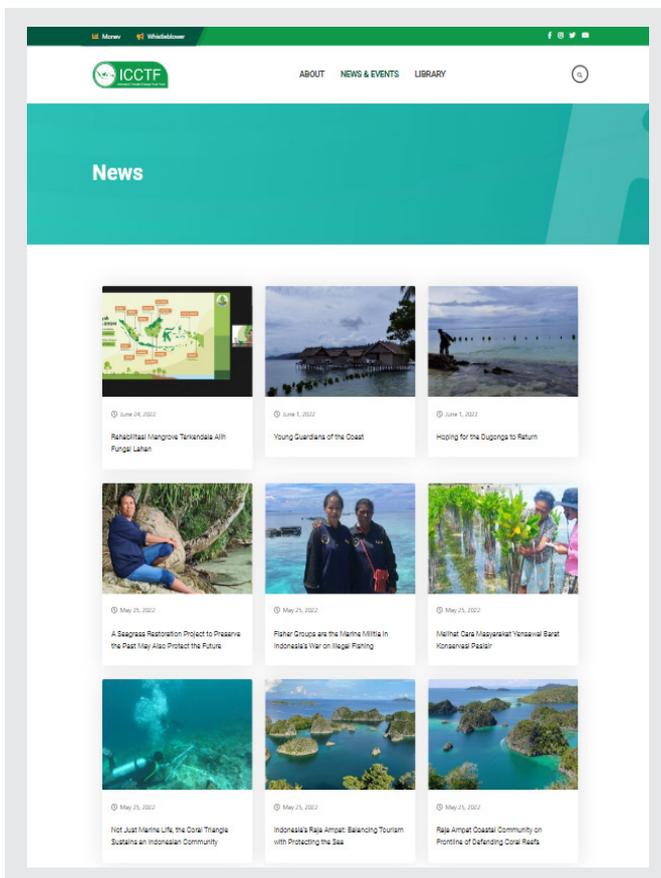
Gambar 3.1.9 Hasil Jangkauan Halaman Twitter Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 2 (Bulan Mei) Tahun 2022.



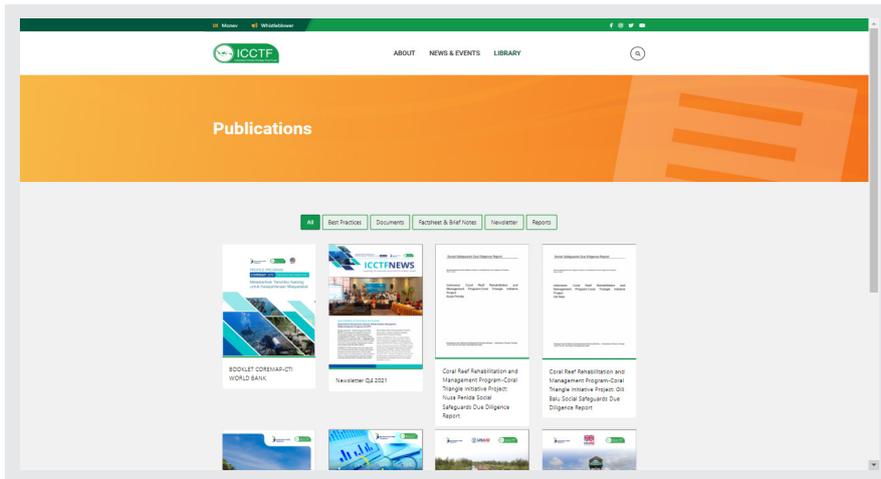
Gambar 3.1.10 Hasil Jangkauan Twitter Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 2 (Bulan Juni) Tahun 2022.



Gambar 3.1.11 Hasil Jangkauan Instagram Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 2 (Bulan April, Mei dan Juni) Tahun 2022.



Gambar 3.1.12 Tampilan pada halaman News dan Artikel Website Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 2 (Bulan April, Mei dan Juni) Tahun 2022.



Gambar 3.1.13 Tampilan pada halaman Publikasi Website yang telah tayang di ICCTF News pada Kuartal 2 (Bulan April, Mei dan Juni) Tahun 2022.

3.2 Produksi Media Publikasi

Pada Kuartal 2 2022 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan komunikasi massa secara digital. ICCTF dan mitra pelaksana COREMAP-CTI World Bank dengan melakukan produksi materi komunikasi baik secara digital dalam bentuk cetak dan visual. Produksi media secara digital untuk mendukung kegiatan sekretariat seperti poster ICCTF Marine Based Program (3.2.1), Poster COREMAP-CTI ADB (3.2.2), Poster COREMAP-CTI WB Achievement (3.2.3), Poster COREMAP-CTI WB Component (3.2.4) dan Poster Indonesia Blue Carbon Strategy Framework (3.2.5). Kemudian termasuk dengan menyelesaikan layout dan publikasi Design Sosial Media Content Kuartal 2 (Bulan April, Mei, dan Juni) Tahun 2022 yang dapat dilihat pada gambar 3.2.6.



Gambar 3.2.1

Gambar 3.2.2

Gambar 3.2.3

Gambar 3.2.4

Gambar 3.2.5

Gambar 3.2.6 Tampilan Desain Layout dan Publikasi Sosial Media Content Kuartal 2 (Bulan April, Mei, dan Juni) Tahun 2022

3.3 Media Monitoring

Pada Kuartal 2 2022 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan Media Monitoring terhadap kegiatan yang melibatkan media massa baik cetak maupun online. Pada kuartal ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan Media Monitoring terhadap kegiatan yang melibatkan media massa di antaranya Exit Strategi COREMAP-CTI World Bank di

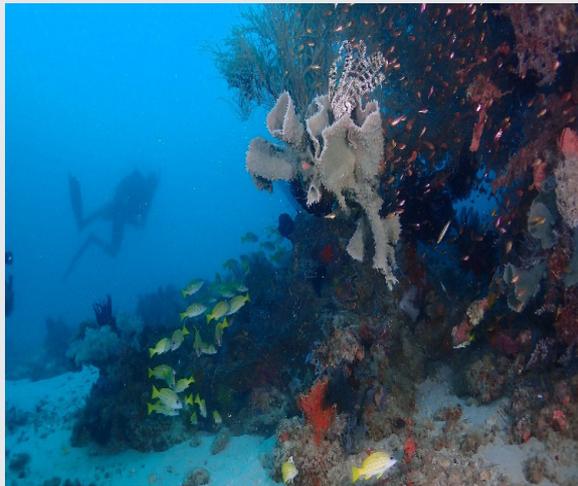
Raja Ampat, Papua Barat, *Closing Project* COREMAP-CTI World Bank di Jakarta, dan Media Visit “Liputan The Journey Metro TV” COREMAP-CTI di Laut Sawu NTT

Tabel 3.3.1 Daftar Publikasi Berita kegiatan Exit Strategi & Media Visit COREMAP-CTI World Bank Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat; dan Closing Project COREMAP-CTI WB di Jakarta

NO	MEDIA	TANGGAL TERBIT	JUDUL BERITA	LINK PUBLIKASI
1.	Indonesiabaik.id / KOMINFO	01-Apr-22	Terus Letarikan Ekosistem Pesisir Raja Ampat.	https://indonesiabaik.id/videografis/terus-lestarikan-ekosistem-pesisir-raja-ampat
2.	Antaraneews.com	03-Apr-22	Kini Penduduk Mutus Garda Depan Pelestarian Laut Raja Ampat	https://www.antaranews.com/berita/2799145/kini-penduduk-mutus-garda-depan-pelestarian-laut-raja-ampat
3.	National Geographic	04-Apr-22	Melacak Surga Pari Manta Di Raja Ampat	https://nationalgeographic.grid.id/read/133212819/melacak-surga-pari-manta-di-rajaampat-yef-nabi-kecil-sampai-arborek?page=3
4.	Kompas.com	04-Apr-22	Coremap-CTI Bantu Dorong Pengembangan Model Pengelolaan Pesisir Raja Ampat	https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/04/190300023/coremap-cti-bantu-dorong-pengembangan-model-pengelolaan-pesisir-raja-ampat
5.	Kompas.com	05-Apr-22	Kepulauan Raja Ampat Sebagai Jantung Segitiga Terumbu Karang Dunia Apa Fungsinya?	https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/05/120200623/kepulauan-raja-ampat-sebagai-jantung-segitiga-terumbu-karang-dunia-apa
6.	Kompas.com	06-Apr-22	Segitiga Terumbu Karang Di Kepulauan Raja Ampat Amazon of Ocean Terancam	https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/06/090100023/segitiga-terumbu-karang-di-kepulauan-raja-ampat-amazon-of-ocean-terancam
7.	Ninopedia	06-Apr-22	Amazon of Ocean Asli Indonesia Terancam Punah Berikut 4 Hal yang Mengancam Kelestariannya	https://www.ninopedia.com/19477/Amazon-of-Ocean-Asli-Indonesia-Terancam-Punah-Berikut-4-Hal-yang-Mengancam-Kelestariannya
8.	Idntimes	7-Apr-22	Pokmaswas Raja Ampat Garda Depan Masyarakat Penjaga Amazon of Oceran	https://www.idntimes.com/news/indonesia/hana-adi-perdana-1/pokmaswas-raja-ampat-garda-depan-masyarakat-penjaga-amazon-of-ocean/3

9.	Kompas.id (Juga Terbit Cetak)	8-Apr-22	Nona-nona Penjaga Andoi	https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/03/30/nona-nona-penjaga-andoi?utm_source=medsos_twitter&utm_medium=link
10.	Nikkei Asia	26-Apr-22	Indonesia's Raja Ampat: balancing tourism with protecting the sea	https://asia.nikkei.com/Business/Travel-Leisure/Indonesia-s-Raja-Ampat-balancing-tourism-with-protecting-the-sea
11.	Media Indonesia	11 Mei 2022	Model Inovasi Pembangunan COREMAP-CTI Perlu Diperkuat	https://m.mediaindonesia.com/humaniora/491636/model-inovasi-pembangunan-coremap-cti-perlu-diperkuat
12.	Antaraneews.com	11 Mei 2022	Program COREMAP-CTI Diharap Jadi Model Pengelolaan Ekosistem Pesisir	https://www.antaraneews.com/berita/2872785/program-coremap-cti-diharap-jadi-model-pengelolaan-ekosistem-pesisir
13.	Antaraneews.com	11 Mei 2022	Bappenas: Program Penyelamatan Terumbu Karang Hidupkan Ekonomi Lokal	https://www.antaraneews.com/berita/2873541/bappenas-program-penyelamatan-terumbu-karang-hidupkan-ekonomi-lokal
14.	IDN Times	11 Mei 2022	Mengenal Program Reha1bilitasi Terumbu Karang Yang Didanai Bank Dunia	https://www.idntimes.com/business/economy/hafit-yudi-suprobo-1/mengenal-program-rehabilitasi-terumbu-karang-yang-didanai-bank-dunia
15.	IDN Times	11 Mei 2022	Bank Dunia Puji Konservasi Perairan Indonesia	https://www.idntimes.com/news/indonesia/hafit-yudi-suprobo-1/bank-dunia-puji-konservasi-perairan-indonesia
16.	Dari Laut.id	11 Mei 2022	COREMAP-CTI Menyelaraskan Pelestarian Terumbu Karang dan Penghidupan Masyarakat	https://darilaut.id/berita/coremap-cti-menyelaraskan-pelestarian-terumbu-karang-dan-penghidupan-masyarakat
17.	Kompas.com	12 Mei 2022	Melestarikan Ekosistem Laut dan Pesisir COREMAP CTI Jadi Program	https://www.kompas.com/sains/read/2022/05/12/090200823/melestarikan-ekosistem-laut-dan-pesisir-coremap-cti-jadi-program
18.	Kompas.com	12 Mei 2022	Bappenas-Program Rehabilitasi Terumbu Karang Dalam COREMAP-CTI Dapat Diadaptasi Wilayah Lain	https://www.kompas.com/sains/read/2022/05/13/110300623/bappenas-program-rehabilitasi-terumbu-karang-dalam-coremap-cti-dapat?page=all
19.	Portal Papua	12 Mei 2022	Raja Ampat Terpilih Dalam Program Rehabiitasi dan Pengeolaan Terumbu Karang Segitiga Inisiatf Bank Dunia	https://portalpapua.pikiran-rakyat.com/lokal/pr-1304459222/raja-ampat-terpilih-dalam-program-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang-segitiga-inisiatif-bank-dunia

20.	Biisnis Indonesia	12 Mei 2022	Rehabilitasi Terumbu Karang Hidupkan Potensi Ekonomi Pesisir	https://bisnisindonesia.id/article/rehabilitasi-terumbu-karang-hidupkan-potensi-ekonomi-pesisir
21.	Siapgrakk	12 Mei 2022	Mengenal Program Rehabilitasi Terumbu Karang Yang Didanai Bank Dunia	https://siapgrak.com/artikel/WBG6JRv
22.	MSN	11 Mei 2022	Mengenal Program Rehabilitasi Terumbu Karang Yang Didanai Bank Dunia	https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/mengenal-program-rehabilitasi-terumbu-karang-yang-didanai-bank-dunia/ar-AAxasr0?li=AAfuxu5
23.	MSN	11 Mei 2022	Bank Dunia Puji Konservasi Perairan Indonesia	https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/bank-dunia-puji-konservasi-perairan-indonesia/ar-AAxa62o?ocid=EMMX
24.	Kabar24.Bisnis.com	11 Mei 2022	Program Rehabilitasi Terumbu Karang COREMAP-CTI Resmi Ditutup	https://kabar24.bisnis.com/read/20220511/15/1532068/program-rehabilitasi-terumbu-karang-coremap-cti-resmi-ditutup
25.	Yahoo	11 Mei 2022	Mengutip ANTARA	https://id.berita.yahoo.com/program-coremap-cti-diharap-jadi-055844484.html
26.	Asia Today	11 Mei 2022	Mengutip ANTARA	https://asiatoday.id/read/program-coremap-cti-didorong-jadi-referensi-pengelolaan-ekosistem-pesisir-di-indonesia
27.	Badaksatu	11 Mei 2022	Mengutip ANTARA	https://en.badaksatu.com/finance/44313/program-coremap-cti-diharap-jadi-model-pengelolaan-ekosistem-pesisir.html
28.	News allaucation	12 Mei 2022	Mengutip Kompas.com	https://news.allaucation.live/host-https-www.kompas.com/sains/read/2022/05/13/110300623/bappenas-program-rehabilitasi-terumbu-karang-dalam-coremap-cti-dapat?page=all



Gambar 3.3.1 Dokumentasi Media Visit “Liputan The Journey Metro TV
COREMAP-CTI di Laut Sawu NTT”



3

AUDIT, KEUANGAN Dan OPERASIONAL

1. Laporan Audit Tahun 2022

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabel, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara. Pada tahun 2022 ini BPK sudah selesai mengaudit Laporan Keuangan Satuan Kerja Majelis Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran

2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan audit untuk kegiatan Hibah Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) Tahun Anggaran 2021 juga sudah selesai diaudit oleh BPK Audit Khusus per 31 Mei 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Informasi Keuangan Periode April-Juni 2022

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan terkait keuangan sehingga, prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai.

Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara

tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pada tahun 2022 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar 12M dengan self-blocking sebesar 1,376juta dan dana Hibah Luar Negeri (Hibah Terencana) sebesar 67,57M sehingga total dana yang dikelola ICCTF Tahun Anggaran 2022 adalah 79,57M. Capaian pada kuartal 2 tahun 2022 adalah sebesar 28,47M yaitu 35,78% dari total dana yang dikelola.

Tabel Rincian Penyerapan Dana sampai dengan bulan Juni tahun 2022

Sumber Dana	Anggaran	Penz		Sisa Anggaran
APBN - ICCTF	12.000.000.000	3.306.408.916	28%	8.693.591.084
Hibah – WorldBank (Reksus)	19.827.109.000	18.500.362.191	93%	1.326.746.809
Hibah – Asian Development Bank (Reksus)	47.746.039.000	6.663.996.853	14%	41.082.042.147
TOTAL	79.573.148.000	28.470.767.960	36%	51.102.380.040

3. Operasional / Kesekretariatan

Sampai pada Triwulan 2, jumlah tenaga professional yang mendukung kegiatan ICCTF berjumlah 28 Orang yang terdiri dari 14 konsultan dengan penugasan time base, 2 konsultan output base, 1 konsultan intermittent dan 10 tenaga jasa lainnya. Penyebaran gender terdiri dari 17 jenis kelamin laki-laki dan 11 jenis kelamin perempuan sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	Pendanaan
1	Gabriel A. Wagey	Executive Director	Rupiah Murni (APBN)
2	Mega Gusti Rama	Finance and Operation Manager	Rupiah Murni (APBN)
3	Februanty Suyatiningsih	Program Manager	Rupiah Murni (APBN)
4	Anggri Heravanthi	Accounting Specialist	Rupiah Murni (APBN)
5	SiwiHandinah	General Adm dan HR Coordinator	Rupiah Murni (APBN)
6	Muhammad Wildan Kautsar	Knowledge Management Officer	Rupiah Murni (APBN)
7	Joshua Arianto M	Program Officer	Rupiah Murni (APBN)
8	Hans Budiarto I	Program Assistant	Rupiah Murni (APBN)
9	Affalia Maydi Hatika	Communication Assistant	Rupiah Murni (APBN)
10	Musfarayani	Communication Specialist	Rupiah Murni (APBN)
11	Eko Wahyudi	Finance and Administration Officer COREMAP-CTI WB	Rupiah Murni (APBN)
12	Agus Salim	Logistic and General Support	Rupiah Murni (APBN)
13	Sugihartono	Office Assistant	Rupiah Murni (APBN)
14	Muhamad Nuryanto	Database Assistant	Rupiah Murni (APBN)
15	Nur Jali	Procurement Officer	Rupiah Murni (APBN)
16	Andrian Firmansyah	Tenaga Operasional Perkantoran	Rupiah Murni (APBN)
17	Budiyanto	Pengemudi	Rupiah Murni (APBN)
18	Steven R. Limbong	Program Officer COREMAP-CTI WB	Hibah LN WB
19	Alya Prima Syanti	Financial Management Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
20	Leonas Chatim	Project Team Leader COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
21	Nia Kania	Administration Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
22	Dimas Darmawan	Procurement Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
23	Nanda Sachra Y	Monev Specialist COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
24	Novita Fitrianingrum	Program Officer COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
25	Agus Salim	Site Coordinator Gili Matra	Hibah LN ADB
26	Lalu Alid Riadi	Site Coordinator Gili Balu	Hibah LN ADB

27	I Gede Wahyu Sena W	Site Coordinator Nusa Penida	Hibah LN ADB
28	Derick Prawira	Creative Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB

Kegiatan-kegiatan Sekretariat ICCTF yang dilaksanakan sepanjang triwulan 2 yaitu:

a. Undangan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022 dengan agenda sosialisasi dan bimbingan teknis terkait aplikasi pengadaan dan pembelanjaan. Hasil dari pertemuan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Anggaran harus sesuai dengan perencanaan namun penyerapan sampai saat ini masih di bawah 50%, hal ini agar menjadi perhatian pada setiap PPK.
- Kedepan diharapkan ada peningkatan data penggunaan marketplace yang signifikan dari setiap PPK kedepan untuk PDN yang pro ke UMKM, dan juga dalam penggunaan KKP Pemerintah, sebab hal ini akan berdampak terhadap 30% penilaian barang dan jasa
- Manfaat yang bisa didapat dari penggunaan marketplace adalah transparansi belanja yang dilakukan oleh pengguna, dan penyedia



Gambar. Jalannya proses sosialisasi dan bimbingan teknis kepada peserta rapat

- Perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja dari Bela Pengadaan dan DiGiPay
- Untuk kebutuhan training bisa secara langsung mengajukan kepada tim UKPBJ Bappenas

b. Undangan Pembahasan Rencana Kunjungan Kerja ke Kanada

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022 dengan agenda pembahasan persiapan kunjungan kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Agenda rencana kunjungan Menteri PPN/ Bappenas ke Kanada dibuat terpisah dengan matrix summary setiap kunjungan

No.	Tema	Objek	Substansi	Referensi	Indikator / Tindak Lanjut	Disseminasi / Tindak Lanjut
1	Berkas dan Bimbingan Teknis (Kunjungan)	Tugas dan Perencanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.	Kelembagaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.	Kelembagaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.	Kelembagaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.	Kelembagaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.
4	Pelaksanaan	Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.	Kelembagaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.	Kelembagaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.	Kelembagaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.	Kelembagaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.
7	Low Carbon Development	Kelembagaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.	Kelembagaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.	Kelembagaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.	Kelembagaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.	Kelembagaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kanada (West Coast), khususnya Portland, Seattle dan Vancouver pada Bulan Juli 2022.

- Setiap PIC dapat menambahkan deliverable/ take away yang dihasilkan dari setiap kunjungan yang dilaksanakan
- Setiap PIC menambahkan relevansi PN/ MP setiap kegiatan kunjungan yang akan dilaksanakan

LAPORAN **2** TRIWULAN 2022

